



# APBN KITA

KINERJA DAN FAKTA



ANNUAL MEETINGS  
**2018 indonesia**  
INTERNATIONAL MONETARY FUND  
WORLD BANK GROUP

Realisasi Penerimaan Meningkat di Tengah Tekanan  
Ekonomi Global





“Kalau mereka (Majalah Global Markets) menyebutkan bahwa efektivitas dan kredibilitas dari APBN dan juga perbaikan dari sisi belanja negara, saya rasa itu adalah kriteria yang cukup baik, menunjukkan apa yang selama ini Kementerian Keuangan lakukan,”

Menkeu Sri Mulyani sesaat setelah menerima penghargaan di Hotel Ayodya Nusa Dua, Bali, Sabtu (13/10)



### Rp **Pendapatan Negara** **Rp1.312,32 triliun**

Sampai dengan akhir triwulan III 2018 atau akhir bulan September 2018, capaian realisasi penerimaan pendapatan negara dan hibah sebesar Rp1.312,32 triliun atau telah mencapai 69,26 persen dari target penerimaan pendapatan negara dan hibah pada APBN 2018.



### Rp **Penerimaan Perpajakan** **Rp1.024,51**

Pendapatan negara yang berasal dari penerimaan Perpajakan, PNBPN, dan Hibah berturut-turut sebesar Rp1.024,51 triliun, Rp281,37 triliun, dan Rp6,45 triliun, atau masing-masing telah mencapai 63,32 persen, 102,16 persen, dan 538,56 persen dari target penerimaan yang ditetapkan pada APBN 2018.

Komponen penerimaan Perpajakan sampai dengan 30 September 2018:

- Rp900,86 triliun dari realisasi penerimaan pajak (63,26 persen target penerimaan pada APBN 2018)
- Rp123,64 triliun lainnya berasal dari realisasi penerimaan Kepabeanan dan Cukai (63,70 persen dari target penerimaan pada APBN 2018)



### **Belanja Negara** **Rp1.512,55 triliun**

Realisasi Belanja Negara sampai dengan akhir September 2018 sebesar Rp1.512,55 triliun, mencapai sekitar 68,1 persen dari pagu APBN



### **TKDD** **Rp573,77 triliun**

Realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sampai dengan September 2018 telah mencapai Rp573,77 triliun atau 74,9 persen dari pagu APBN 2018, yang meliputi Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp535,85 triliun (75,9 persen) dan Dana Desa Rp37,92 triliun (63,2 persen).



### **Realisasi Defisit** **1,35 % PDB**

Realisasi defisit APBN hingga September 2018 mencapai Rp200,23 triliun atau sekitar 1,35 persen PDB.

## RINGKASAN EKSEKUTIF

**P**rospek pertumbuhan perekonomian global tahun 2018 diperkirakan melambat dari perkiraan sebelumnya seiring dengan tekanan perdagangan global dan pengetatan keuangan global.

Prospek pelambatan pertumbuhan diperkirakan akan berlangsung di kawasan Eropa, Jepang, dan negara-negara emerging market. Proyeksi pelambatan ini sesuai dengan apa yang selama ini disampaikan Pemerintah terkait kondisi perekonomian global. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Pemerintah untuk terus melakukan penguatan fundamental dan stabilitas ekonomi sebagai landasan pertumbuhan ekonomi ke depan. Tingkat inflasi yang terkendali akan mampu menjaga tingkat konsumsi masyarakat dan penguatan infrastruktur akan mendorong investasi untuk menopang pertumbuhan ekonomi. Dari sisi produksi, kinerja PDB nasional tetap akan ditopang oleh sektor-sektor utama antara lain sektor industri

pengolahan, perdagangan, konstruksi, dan jasa-jasa. Pemerintah masih akan menghadapi tekanan nilai tukar Rupiah, namun kondisi stabilitas ekonomi tetap terjaga karena masih terdapat cukup ruang untuk mencapai target inflasi.

**Sampai dengan akhir triwulan III 2018 atau akhir bulan September 2018, capaian realisasi penerimaan pendapatan negara dan hibah sebesar Rp1.312,32 triliun atau telah mencapai 69,26 persen dari target penerimaan pendapatan negara dan hibah pada APBN 2018. Penerimaan pendapatan negara yang berasal dari penerimaan Perpajakan, PNBPN, dan Hibah berturut-turut sebesar Rp1.024,51 triliun, Rp281,37 triliun, dan Rp6,45 triliun, atau masing-masing telah mencapai 63,32 persen, 102,16 persen, dan 538,56 persen dari target penerimaan yang ditetapkan pada APBN 2018.** Berdasarkan pola pertumbuhannya secara *year-on-year (yoy)*, realisasi penerimaan perpajakan dan PNBPN hingga akhir Agustus 2018 tetap

tumbuh berturut-turut sebesar **16,55 persen** dan **27,13 persen**.

**Komponen penerimaan Perpajakan sampai dengan 30 September 2018, sebesar Rp900,86 triliun tercatat berasal dari realisasi penerimaan pajak, sedangkan Rp123,64 triliun lainnya berasal dari realisasi penerimaan Kepabeanaan dan Cukai. Angka capaian dari penerimaan pajak dan penerimaan kepabeanaan dan cukai masing-masing telah memenuhi 63,26 persen dan 63,70 persen dari target penerimaan pada APBN 2018.** Dari sisi pertumbuhannya, realisasi penerimaan pajak masih tumbuh sebesar 16,87 persen (yoy), dan jika tidak memperhitungkan penerimaan dari uang tebusan tax amnesty pada tahun 2017 maka penerimaan pajak tercatat mampu tumbuh 18,73 persen (yoy). Kinerja positif dari penerimaan PPh nonmigas, PPh migas, serta penerimaan PPN dan PPnBM yang tumbuh cukup signifikan menjadi faktor pendorong pertumbuhan penerimaan pajak, dimana pada periode Januari-September 2018 merupakan yang tertinggi dalam empat tahun terakhir. Lebih lanjut, penerimaan dari komponen Cukai, Bea Masuk (BM), dan Bea Keluar (BK) juga masih tumbuh secara signifikan, dan mampu mendorong realisasi penerimaan Kepabeanaan dan Cukai secara keseluruhan tumbuh positif mencapai 14,24 persen (yoy). Capaian tersebut juga merupakan capaian pertumbuhan realisasi yang tertinggi dalam tiga tahun terakhir.

**Secara lebih rinci, komponen penerimaan pajak yang berasal dari PPh nonmigas mampu tumbuh sebesar 16,72 persen (yoy).**

**Masing-masing komponen utama penerimaan PPh, yang terdiri dari PPh 25/29 Badan, PPh 25/29 OP, dan PPh 22 Impor, mampu terus tumbuh berturut-turut sebesar 25,04 persen (yoy), 21,79 persen (yoy), dan 26,20 persen (yoy).**

Faktor yang mendorong tumbuhnya penerimaan komponen utama PPh tersebut antara lain meningkatnya aktivitas perdagangan internasional dan kinerja sektor usaha industri, perdagangan, pertambangan, dan pertanian. Selain itu, penerimaan PPh Pasal 26 yang tercatat tumbuh sebesar 26,64 persen (yoy), akibat pengaruh depresiasi rupiah terhadap dollar Amerika, juga menjadi salah satu faktor yang ikut mendorong pertumbuhan penerimaan PPh nonmigas. Dari sisi penerimaan PPh migas, tercatat realisasi penerimaannya mampu tumbuh secara signifikan sebesar 23,31 persen (yoy), dimana pertumbuhan penerimaan PPh migas tersebut utamanya masih didorong oleh faktor meningkatnya harga ICP.

**Komponen penerimaan pajak yang lain berasal dari penerimaan PPN dan PPnBM, dimana realisasinya tumbuh mencapai 14,43 persen (yoy).** Faktor kinerja aktivitas impor dan pertumbuhan konsumsi dalam negeri, masih menjadi pendorong pertumbuhan penerimaan PPN Impor dan PPN DN, masing-masing sebesar 27,52 persen (yoy) dan 8,22

persen (yoy). Namun, kinerja PPnBM DN hingga akhir September 2018 masih mengalami pertumbuhan negatif sebesar -5,96 persen (yoy), sedangkan realisasi PPnBM Impor sudah mulai mengalami pertumbuhan yang positif sebesar 7,16 persen (yoy).

**Sementara itu, hingga akhir September 2018 realisasi komponen penerimaan perpajakan yang berasal dari penerimaan Kepabeanaan dan Cukai realisasi penerimaannya masih terus melanjutkan tren pertumbuhan yang signifikan sejak awal tahun 2018. Komponen penerimaan dari Cukai tercatat masih tumbuh sebesar 11,17 persen (yoy), penerimaan BM tumbuh mencapai 15,50 persen (yoy), dan penerimaan BK, merupakan komponen penerimaan dengan tingkat pertumbuhan tertinggi, tumbuh signifikan mencapai 96,80 persen (yoy).** Faktor yang mendorong pertumbuhan penerimaan Kepabeanaan dan Cukai diantaranya yaitu peningkatan aktivitas perdagangan internasional, dampak positif kebijakan Kepabeanaan dan Cukai melalui program Penertiban Importir Berisiko Tinggi (PIBT) dan Penertiban Cukai Berisiko Tinggi (PCBT), serta peningkatan harga komoditas internasional.

Secara lebih detil, pertumbuhan realisasi penerimaan Cukai yang berasal dari komponen penerimaan cukai hasil tembakau (CHT) mampu

tumbuh mencapai 10,55 persen (yoy). Penerimaan CHT yang secara nominal merupakan yang terbesar dalam komponen penerimaan cukai, pertumbuhannya didorong oleh faktor meningkatnya produksi HT, sebagai akibat kebijakan program pemberantasan peredaran rokok ilegal, dan kenaikan tarif efektif cukai pada produk HT yang lebih tinggi dibandingkan kenaikan rata-rata tarifnya di 2018. Sementara itu, realisasi penerimaan dari cukai minuman mengandung etil alkohol (MMEA) tercatat tumbuh sebesar 18,67 persen (yoy), dimana merupakan prosentase pertumbuhan tertinggi dari komponen penerimaan cukai.

Lebih lanjut, realisasi komponen penerimaan BM pertumbuhannya masih didorong utamanya oleh faktor peningkatan aktivitas impor yang didukung oleh program PIBT. Pertumbuhan impor yang didominasi oleh aktivitas impor dari sektor industri pengolahan (manufaktur) menunjukkan indikasi aktivitas industri dalam negeri yang masih terus tumbuh dan berkembang. Di sisi yang lain, pertumbuhan aktivitas ekspor minerba akibat relatif stabilnya harga komoditas mineral dan masih tingginya permintaan dari mitra dagang Indonesia, masih menjadi faktor utama yang mendorong pertumbuhan positif dari realisasi penerimaan BK hingga akhir Triwulan III 2018.

**Realisasi PNBPN sampai dengan akhir September 2018 mencapai Rp281,37 triliun atau 102,16 persen dari target APBN 2018.**

Capaian Realisasi PNBPN ini mengalami pertumbuhan sebesar 27,13 persen dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2017. Peningkatan ini terutama disebabkan meningkatnya penerimaan Sumber Daya Alam karena masih berlanjutnya kenaikan harga komoditas minyak bumi dan batu bara sepanjang periode Januari-September 2018. Realisasi penerimaan SDA Migas tumbuh sebesar 53,90 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Kenaikan penerimaan SDA Migas tersebut terutama disebabkan adanya tren peningkatan harga ICP. Sampai dengan akhir September 2018, rata-rata harga ICP tercatat sebesar USD68,24/barel. Sementara itu, realisasi penerimaan SDA Non Migas mencapai Rp26,81 triliun atau 114,95 persen terhadap APBN 2018 atau mampu tumbuh sebesar 32,20 persen dibandingkan bulan yang sama pada tahun 2017. Peningkatan kenaikan rata-rata harga batubara acuan (HBA) pada periode Januari-September 2018 yang mencapai USD99,58 per ton, lebih tinggi dibandingkan HBA periode Januari-September 2017 sebesar USD83,13 per ton merupakan salah satu faktor utama peningkatan

realisasi penerimaan SDA Non Migas tersebut. Penerimaan dari kekayaan negara yang dipisahkan sampai dengan September 2018 mencapai Rp41,12 triliun atau 92,00 persen dari target APBN 2018. Pada periode yang sama, PNBPN Lainnya telah mencapai 95,25 persen dari target APBN 2018. Sementara itu, pendapatan BLU mencapai sebesar Rp39,50 triliun, atau 91,22 persen dari target APBN 2018 atau tumbuh sebesar 17,14 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

**Realisasi Belanja Negara sampai dengan akhir September 2018 sebesar Rp1.512,55 triliun, mencapai sekitar 68,1 persen dari pagu APBN, atau meningkat 10,00 persen jika dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun sebelumnya.** Realisasi Belanja Negara tersebut meliputi Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp938,78 triliun dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp573,77 triliun. Pemerintah terus mendorong upaya perbaikan kinerja penyerapan anggaran agar pelaksanaan APBN dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Upaya perbaikan tersebut tercermin antara lain dari realisasi Belanja Pemerintah Pusat hingga bulan September 2018 yang tumbuh 16,12 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Pertumbuhan

realisasi Belanja Pemerintah Pusat tersebut utamanya dipengaruhi oleh realisasi Belanja Bantuan Sosial yang sudah mencapai Rp62,77 triliun (tumbuh 46,9 persen) dan Subsidi yang mencapai Rp123,41 triliun (tumbuh 33,6 persen). Membaiknya kinerja belanja bansos tersebut antara lain dipengaruhi oleh percepatan pembayaran PBI program JKN. Sementara itu, realisasi belanja subsidi sampai dengan akhir September 2018 tersebut di atas meliputi subsidi energi Rp92,54 triliun dan subsidi non energi Rp30,87 triliun. Lebih tingginya realisasi belanja subsidi sampai dengan bulan September 2018 dibandingkan realisasi periode yang sama di tahun 2017 dipengaruhi oleh pergerakan harga minyak mentah Indonesia (ICP) dan nilai tukar rupiah (kurs), serta pembayaran sebagian kurang bayar belanja subsidi tahun-tahun sebelumnya sebagai bentuk komitmen Pemerintah dalam menjaga good governance dan kinerja keuangan BUMN. Sampai dengan akhir tahun 2018, Pemerintah akan secara konsisten menjaga alokasi kebutuhan subsidi yang sangat penting dalam upaya menjaga daya beli masyarakat, dengan memperhatikan pergerakan parameter dan asumsi makro APBN, serta kesinambungan pengelolaan keuangan Negara.

**Realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sampai dengan September 2018 telah mencapai Rp573,77 triliun atau 74,9 persen dari pagu APBN 2018, yang meliputi Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp535,85 triliun (75,9 persen) dan Dana Desa Rp37,92 triliun (63,2 persen),** Secara lebih rinci, realisasi TKD terdiri dari Dana Perimbangan Rp514,56 triliun (76,1 persen), Dana Insentif Daerah (DID) Rp7,24 triliun (85,2 persen), serta Dana Otonomi Khusus dan Keistimewaan DIY Rp14,04 triliun (66,7 persen). Realisasi TKD sampai dengan September 2018 tersebut lebih tinggi Rp8,91 triliun atau sekitar 1,7 persen bila dibandingkan realisasi TKD pada periode yang sama tahun 2017. Tingginya realisasi TKD sampai dengan September 2018 tersebut terutama disebabkan oleh: (1) meningkatnya realisasi Dana Transfer Khusus (DAK Fisik dan Non Fisik) yang lebih tinggi sekitar 17,6 persen dibandingkan dengan periode sebelumnya, karena proses penyaluran dana yang relatif lebih cepat dibandingkan periode sebelumnya; (2) Realisasi DAU yang lebih tinggi 0,6 persen dibandingkan periode sebelumnya karena penyaluran DAU yang cukup meningkat hingga triwulan 3 tahun 2018; dan (3) Tingginya realisasi Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan DIY yang disebabkan

karena penyaluran dananya yang relatif meningkat pada triwulan 3 tahun 2018. Sementara itu, realisasi Dana Desa sampai dengan September 2018 lebih rendah Rp1,71 triliun (4,3 persen) dibandingkan realisasi Dana Desa pada periode yang sama tahun 2017. Hal tersebut dipengaruhi oleh lambannya realisasi penyerapan DD yang terjadi di beberapa desa karena keterlambatan dalam memenuhi beberapa persyaratan dokumen penyaluran.

**Keberlanjutan fiskal di tahun 2018 diharapkan akan tetap terjaga. Realisasi defisit APBN hingga September 2018 mencapai Rp200,23 triliun atau sekitar 1,35 persen PDB.** Realisasi defisit tersebut lebih rendah dari realisasi defisit di periode tahun sebelumnya, baik secara nominal maupun persentase terhadap PDB. Sementara itu, posisi keseimbangan primer per September 2018 berada pada posisi negatif Rp2,40 triliun, tetapi masih jauh lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai negatif Rp99,24 triliun. Kondisi ini sejalan dengan upaya Pemerintah yang senantiasa menjaga pengelolaan APBN yang

sehat dan berkelanjutan antara lain melalui negatif keseimbangan primer yang semakin mengecil dan menuju ke arah positif. Realisasi pembiayaan yang dilakukan Pemerintah hingga September 2018 mencapai Rp292,83 triliun, terutama bersumber dari pembiayaan utang yaitu sebesar Rp304,94 triliun, atau mencapai 76,4 persen dari APBN 2018. Realisasi pembiayaan utang tersebut terdiri dari penerbitan SBN (neto) sebesar Rp308,76 triliun atau mencapai 74,5 persen dari APBN 2018 dan pinjaman (neto) sebesar negatif Rp3,82 triliun atau sekitar 25,0 persen dari rencana Pemerintah di tahun 2018. Pertumbuhan pembiayaan utang menunjukkan tren yang menurun apabila dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2017 yaitu turun sebesar 25,14 persen. Hal ini seiring dengan komitmen Pemerintah untuk tetap mendorong pengelolaan utang yang prudent dan produktif antara lain dengan menjaga rasio utang dalam batas aman, meningkatkan efisiensi atas pengelolaan utang, mendorong pemanfaatan utang untuk kegiatan produktif, serta menjaga keseimbangan pengelolaan utang.

Halaman Kosong

## Sidang Tahunan Dana Moneter Internasional dan Kelompok Bank Dunia (IMF-WBG Annual Meetings) 2018 Membawa Dampak Yang Positif Bagi Indonesia



**P**emerintah Indonesia bertindak sebagai tuan rumah penyelenggaraan Sidang Tahunan Dana Moneter Internasional dan Kelompok Bank Dunia (IMF-WBG Annual Meetings) yang dilaksanakan di Nusa Dua, Bali pada tanggal 8-14 Oktober 2018. Indonesia terpilih sebagai tuan rumah IMF-WBG AMs 2018 setelah melalui proses seleksi dan evaluasi yang cukup panjang, sebelum akhirnya diputuskan oleh para Governor IMF dan WB.

Indonesia merupakan negara ASEAN ke-4 yang terpilih sebagai tuan rumah IMF-WBG AMs. Tiga

negara ASEAN yang telah terpilihnya sebelumnya adalah Philipina pada tahun 1976, Thailand pada tahun 1991 dan Singapura pada tahun 2006. Kesempatan menjadi tuan rumah IMF-WBG AMs 2018 merupakan momentum yang sangat baik bagi Indonesia untuk menunjukkan leadership Indonesia di kawasan ASEAN sekaligus sebagai satu-satunya negara ASEAN di Forum G20.

Agenda yang dibahas dalam pertemuan tersebut meliputi perkembangan ekonomi dunia berikut tantangan dan upaya untuk mengatasinya, pemanfaatan perkembangan teknologi untuk

mendorong pertumbuhan inklusif, adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, skema pembiayaan dan asuransi bencana alam, investasi pada sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, pengelolaan urbanisasi, pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan, peningkatan peran kaum wanita, serta isu-isu institusional pada IMF dan WB.

IMF-WBG AMs 2018 juga menjadi agenda yang sangat penting bagi negara-negara di dunia untuk mewujudkan tujuan Sustainable Development Goals (SDGs) 2030, terutama dalam membebaskan dunia dari kelaparan dan kemiskinan. Dalam mewujudkan tujuan SDGs, diperlukan pembiayaan yang sangat besar, sekitar USD6 triliun per tahun. Untuk itu, kemitraan dan kerja sama yang erat melibatkan semua pihak, termasuk pelaku swasta dan philanthropies, sangat diperlukan untuk memobilisasi sumber daya dan sumber dana.

Berbagai isu yang dibahas dalam IMF-WBG AMs 2018 tersebut sangat relevan dengan agenda dan kepentingan nasional. Setelah melalui proses negosiasi yang cukup alot, IMF dan Bank Dunia dapat mengakomodasi usulan Indonesia untuk membahas isu-isu yang menjadi prioritas nasional dalam sidang tahunan tersebut, antara lain terkait dengan isu investasi pada human capital, pemanfaatan teknologi untuk mendorong

pertumbuhan, inovasi pembiayaan infrastruktur, pengelolaan urbanisasi, penanganan isu-isu perubahan iklim termasuk mendorong investasi swasta dalam perubahan iklim, penanganan bencana alam dengan mengembangkan mekanisme pembiayaan dan asuransi yang tepat dan pengembangan keuangan syariah dalam rangka pendalaman sektor keuangan. Isu-isu tersebut dibahas dalam beberapa flagship diskusi yang menghasilkan rekomendasi-rekomendasi kebijakan yang bermanfaat bagi semua negara di dunia, khususnya Indonesia.

Adapun kesepakatan yang dihasilkan dalam IMF-WBG AMs 2018, yang dikenal dengan Bali Initiative adalah sebagai berikut :

1. Penanganan Ketidakstabilan Ekonomi Global dengan merilis World Economic Outlook October 2018 :
  - IMF merevisi ke bawah proyeksi pertumbuhan global untuk tahun 2018 dan 2019 sebanyak 0.2 percentage points menjadi 3.7%, atau pada tingkat yang sama dengan realisasi tahun 2017. Meskipun demikian tingkat pertumbuhan tersebut masih lebih tinggi dibanding periode 2012-2016.
2. Penanganan Urbanisasi dengan pengelola yang difokuskan pada tiga tujuan utama :

- Mempertemukan dan memperluas layanan dasar untuk memastikan bahwa penduduk Indonesia bisa menikmati pendidikan, kesehatan, air bersih dan sanitasi yang bermutu untuk mengurangi ketimpangan.
  - Menghubungkan dan mengintegrasikan jaringan transportasi baik dalam kota maupun dari daerah sekitarnya untuk menghindari konsentrasi penduduk di perkotaan.
  - Meningkatkan ketersediaan perumahan yang layak huni dan terjangkau.
3. Investasi pada Human Capital ditandai dengan launching Human Capital Indeks (HCI) yang diinisiasi oleh Bank Dunia. HCI berpotensi untuk dapat dijadikan platform dalam penyusunan arah dan strategi percepatan peningkatan kualitas human capital di Indonesia ke depan.
4. Prakarsa Bali Fintech Agenda dengan Inisiasi 12 prinsip FinTech oleh IMF, WB, BI, dan
- Kementerian Keuangan untuk mereduksi hambatan yang timbul dari ketimpangan akses keuangan. Prinsip FinTech tersebut antara lain: (1) Pemanfaatan teknologi FinTech, (2) Penggunaan teknologi baru untuk meningkatkan penyediaan jasa keuangan, dan (3) Penyesuaian kerangka peraturan dan pengawasan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan
5. Indonesia meluncurkan Strategi Pembiayaan dan Asuransi Bencana (Disaster Risk Financing and Insurance – DRFI) untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang tangguh bencana dan terjaminnya keberlangsungan pembangunan berkelanjutan dengan lima strategi utama sebagai berikut :
- Kombinasi instrumen keuangan untuk mendapatkan skema pembiayaan yang efisien dan efektif.
  - APBN untuk menanggung atau menyerap (retain) risiko bencana dengan frekuensi kejadian tinggi namun dengan dampak kerugian rendah sampai dengan sedang.
  - Pembiayaan kontijensi sebagai komplementer APBN untuk menanggung atau menyerap (retain) risiko bencana dengan tingkat kerugian sedang sampai dengan tinggi.
  - Skema pooling fund.
  - Asuransi untuk mengalihkan (transfer) risiko bencana dengan frekuensi yang rendah namun dengan tingkat kerugian sedang-tinggi.

6. Penanganan Perubahan Iklim dengan penciptaan peluang bisnis dan pertumbuhan yang memprioritaskan pendanaan program climate-smart development
7. Prakarsa Pembiayaan Infrastruktur dengan meluncurkan prakarsa SDG Indonesia One (SIO) yang telah menghasilkan komitmen sebesar USD 2,34 miliar untuk penyiapan proyek, mitigasi risiko, pembiayaan dan investasi. SIO melibatkan lembaga keuangan internasional, lembaga donor multilateral dan bilateral, kalangan perbankan, asuransi, filantropis lokal dan internasional, dan lembaga terkait perubahan iklim, selain itu Indonesia juga telah menerbitkan green sukuk pertama di dunia untuk memitigasi climate change
8. Kesepakatan Capital Package
- Kelompok Bank Dunia terus berusaha untuk meningkatkan layanan terbaik bagi anggotanya dalam memberantas kemiskinan dan

kesenjangan. Untuk meningkatkan layanan dimaksud, negara anggota menyepakati kenaikan modal IBRD dan IFC yang dikemas dalam capital package. Negara-negara anggota telah menyepakati resolusi capital package untuk IBRD dan mendorong segera tercapainya resolusi capital package untuk IFC.

Selain manfaat dari sisi substansial, IMF-WBG AMs 2018 tersebut juga membawa keuntungan ekonomi dan sosial bagi Indonesia. Keuntungan ini sudah didapat sejak persiapan penyelenggaraan sidang tahunan. Dalam hal ini, Pemerintah telah membelanjakan anggaran untuk pembangunan infrastruktur yang meliputi bandar udara, jalan raya, jembatan dan pembangkit listrik. Proses pembangunan tersebut telah menyerap banyak tenaga kerja dan membuka lapangan usaha baru. Belanja Pemerintah ini akan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Lebih jauh lagi, keuntungan ekonomi yang lebih besar diperoleh dari sektor pariwisata dan belanja konsumsi yang meliputi akomodasi, transportasi, makan-minum, souvenir dan belanja lain-lain dari para delegasi yang diperkirakan berjumlah lebih dari 34.000 orang. Dalam jangka panjang, tentunya keuntungan yang akan diperoleh adalah hasil dari kesepakatan perdagangan dan investasi para delegasi dengan pelaku domestik



## Peluncuran Human Capital Project

**B**ank Dunia pada tanggal 11 Oktober 2018 dalam acara 2018 IMF-WB Annual Meeting telah meluncurkan *Human Capital Index* sebagai salah satu Bali Initiatives. HCI adalah indeks bernilai 0-1 untuk mengukur keterkaitan beberapa outcome hasil pembangunan sumber daya manusia seperti pendidikan dan kesehatan dan dikaitkan dengan tingkat produktivitas tenaga kerja generasi mendatang. Komponen yang digunakan dalam perhitungan HCI adalah sebagai berikut:

- *Survival*, indikator yang digunakan adalah probabilitas hidup hingga umur lima tahun (probability of survival to age 5)
- Pendidikan, indikator yang digunakan adalah *expected years of schooling* dan *harmonized test scores* untuk mengukur tidak hanya kuantitas tapi juga kualitas pendidikan.
- Kesehatan, indikator yang digunakan adalah survival rate (age 15-60) dan *fraction of children under 5 not stunted*

Salah satu kelebihan HCI adalah tidak hanya mengukur pendidikan di suatu negara dari aspek kuantitas saja tetapi juga aspek kualitas dengan digunakannya indikator *harmonized test scores*. Indikator ini mengkombinasikan berbagai program penilaian mutu pembelajaran yang ada di dunia saat ini yang tentunya bervariasi antar negara, baik dari data yang digunakan maupun dari score-nya.

HCI Indonesia berada di level 0,53 atau masih relatif jauh di bawah Singapura yang menempati urutan pertama dengan index 0,88. HCI Indonesia cukup menggembirakan karena berada di atas rata-rata negara lower middle income. Namun angka ini sedikit lebih rendah dibandingkan rata-rata HCI negara upper middle income. Jika dibandingkan dengan beberapa kawasan, posisi HCI Indonesia relatif lebih baik dari rata-rata negara kawasan Subsahara Afrika dan Asia Selatan tetapi sedikit lebih rendah dibanding rata-rata negara kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara.

Belum optimalnya HCI Indonesia

utama dipengaruhi oleh indikator stunting yang masih berada di bawah rata-rata stunting rate negara lower middle income. Sejauh ini, permasalahan stunting di Indonesia sudah menjadi komitmen bersama untuk diatasi. Presiden memimpin langsung penanganan stunting secara nasional. Sebagai bagian dari itu, pemerintah juga menjalankan Program for Results (PforR) Penanganan Stunting yang melibatkan berbagai kementerian/ lembaga terkait, pemerintah daerah hingga ke level pemerintah desa, dan lembaga internasional yang dikoordinasikan oleh Wakil Presiden dan Menko PMK. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa penanganan stunting yang multisektor dapat dilakukan secara efektif dan dengan menggunakan basis pengetahuan/pengalaman terbaik di dunia.

Di bidang pendidikan, Pemerintah konsisten menjaga anggaran pendidikan minimal 20 persen dari Belanja Negara. Dalam RAPBN 2019 dialokasikan sebesar Rp487,9 triliun, diarahkan untuk meningkatkan akses, distribusi, dan kualitas pendidikan, antara lain melalui: Program Indonesia

Pintar (PIP) dengan sasaran 20,1 juta siswa, Bidikmisi sasaran 471,8 ribu mahasiswa, Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk 57 juta siswa, dan program bea siswa LPDP untuk sebanyak 6 juta penerima bea siswa.

Upaya perbaikan di bidang pendidikan, antara lain dengan: (i) meningkatkan kualitas guru melalui program sertifikasi dan redistribusi guru antardaerah, (ii) meningkatkan efektivitas BOS, (iii) meningkatkan ketepatan sasaran PIP dan perluasan beasiswa afirmasi/Bidikmisi, (iv) pembangunan/rehabilitasi sarana & prasarana sekolah dan universitas, (v) meningkatkan sinergi dengan Pemda, (vi) link and match pendidikan vokasi, dan (vii) penguatan LPDP sebagai Sovereign Wealth Fund (SWF) dana pendidikan.

Di bidang Kesehatan, Pemerintah juga berkomitmen untuk mengalokasikan anggaran kesehatan minimal 5 persen, yang dalam RAPBN 2019 dialokasikan sebesar Rp122 triliun - diarahkan untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan, keberlanjutan program JKN, serta penguatan penanganan stunting.

Upaya perbaikan di bidang Kesehatan antara lain melalui: (i) peningkatan kualitas dan ketersediaan tenaga kesehatan, (ii) perbaikan pelayanan dan ketersediaan fasilitas kesehatan, (iii) penguatan program promotif dan preventif antara lain mendorong pola hidup sehat dan peningkatan nutrisi ibu hamil dan menyusui serta balita, (iv) efektifitas program JKN melalui bauran kebijakan, dan (v) meningkatkan sinergi antara Pusat dan Daerah.

Selain itu, Pemerintah terus mendorong efektifitas program perlindungan sosial antara lain peningkatan besaran bantuan PKH dengan sasaran 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM), mendorong efektifitas Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dengan sasaran 15,6 juta KPM, meningkatkan akses pembiayaan ultra-mikro mencapai 1,4 juta debitur, dan pemberian bantuan iuran untuk program JKN sebanyak 96,8 juta jiwa.

Berbagai kebijakan di sektor pendidikan dan kesehatan di atas

telah berlangsung beberapa tahun, namun dampaknya dirasa tidak optimal terhadap peningkatan human capital di Indonesia. Salah satu faktor yang mengurangi efektifitas program adalah kurangnya koordinasi antarprogram dan antar-K/L dan Pemerintah Daerah. Hal ini menjadi PR besar Pemerintah apabila ingin mengakselerasi peningkatan Human Capital ke depan. Untuk itu, koordinasi yang kuat dan komprehensif baik antarprogram maupun antar-stakeholders perlu terus diperkuat. Setiap stakeholder harus fokus pada pencapaian outcome, tidak hanya output. Selain itu, komitmen yang kuat tidak hanya berasal dari eksekutif namun juga legislatif. Satu lagi hal yang terpenting, peran serta swasta perlu terus didorong agar terlibat langsung memikul tanggung jawab untuk mengembangkan human capital. Partisipasi bersama ini, akan mampu menyiapkan generasi yang berkualitas, yang siap menghadapi dinamika ekonomi global yang sangat dinamis.

Halaman Kosong

# PERKEMBANGAN MAKROEKONOMI

**World Economic Outlook International Monetary Fund (WEO IMF)** bulan Oktober 2018 memperkirakan bahwa prospek perekonomian global hingga akhir tahun 2018 akan mengalami pelambatan sejalan dengan peningkatan ketegangan perdagangan dan pengetatan pasar keuangan global.

**N**ormalisasi kebijakan moneter yang diterapkan Amerika Serikat telah mengakibatkan pembalikan arus modal kembali ke Amerika Serikat yang menimbulkan pengetatan likuiditas global dan menekan nilai tukar mata uang terutama di negara-negara emerging market terhadap dollar Amerika Serikat. Ketegangan perdagangan dunia antara Amerika Serikat dengan Tiongkok dan partner dagang lainnya telah meningkatkan risiko penurunan prospek pertumbuhan global. Prospek penurunan perekonomian global tahun 2018 tersebut juga akan berimbas ke negara-negara di kawasan Eropa, Amerika Latin, dan ASEAN. Proyeksi pelambatan ini sesuai dengan apa yang selama ini selalu disampaikan Pemerintah terkait kondisi perekonomian global. Oleh karena itu, guna mengantisipasi kondisi global tersebut dan untuk mencapai target pertumbuhan, Pemerintah

akan terus berupaya menjaga tingkat konsumsi masyarakat dan meningkatkan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Secara sektoral, sektor industri pengolahan, perdagangan, konstruksi, dan jasa-jasa perlu untuk diperkuat sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

**Stabilitas ekonomi nasional masih tetap terjaga dimana selama 2 bulan berturut-turut (Agustus-September) terjadi deflasi sebesar masing-masing 0,05 persen dan 0,18 persen, meskipun terdapat tekanan terhadap nilai tukar Rupiah.** Inflasi kumulatif hingga September 2018 mencapai 1,94 persen (ytd) atau sebesar 2,88 persen (yoy). Realisasi ini lebih rendah dibandingkan periode sama pada tahun lalu yang mencapai 2,63 persen (ytd) atau 3,72 persen (yoy). Terkendalnya laju inflasi ini didukung oleh relatif stabilnya

inflasi komponen inti, perlambatan inflasi *administered price*, penurunan komponen *volatile food* karena penurunan kenaikan harga komoditas peternakan dan hortikultura (cabai, bawang, sayuran). Deflasi yang terjadi di bulan September 2018 dipengaruhi oleh penurunan harga produk bahan makanan, kelompok transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan. Dengan pencapaian laju inflasi hingga bulan September 2018, Pemerintah optimis bahwa target inflasi sebesar 3,5 persen dapat tercapai, namun akan tetap mewaspadai risiko-risiko yang berpotensi meningkatkan laju inflasi, seperti faktor depresiasi nilai tukar Rupiah, kenaikan harga pangan karena faktor pergantian musim, serta peningkatan permintaan di akhir tahun (Natal dan Liburan).

**Nilai tukar rupiah masih mengalami tekanan hingga September 2018 menyusul kebijakan The Federal Reserve (The Fed) menaikkan tingkat suku bunga. Tekanan tersebut**

**diperkirakan akan terus berlanjut hingga akhir tahun namun terjadi moderasi.** Per 15 Oktober 2018, nilai tukar Rupiah tercatat sebesar Rp15.246 per dolar Amerika Serikat, atau terdepresiasi sebesar 12,58 persen (ytd), sementara Nilai tukar Rupiah rata-rata Januari-September 2018 tercatat sebesar Rp14.048 per dolar Amerika Serikat, lebih tinggi dari asumsi APBN 2018 sebesar Rp13.400 per dolar Amerika Serikat. Kondisi ini juga sedikit berimbas kepada rata-rata tingkat SPN 3 bulan dimana pada lelang terakhir (9 September 2010), yield yang dimenangkan sebesar 5,79 persen, sehingga rata-rata Januari-September 2018 tercatat sebesar 4,75 persen.

**Laju pertumbuhan ekspor Indonesia relatif baik yang didorong kinerja sektor pnonmigasdan pada bulan September 2018 neraca perdagangan mengalami surplus sebesar USD0,23 miliar.** Nilai ekspor kumulatif untuk periode

Januari-September 2018 tercatat sebesar USD134,99 miliar meningkat sebesar 9,41 persen dibanding periode yang sama di tahun 2017 yang tercatat sebesar USD 123,38 miliar. Sementara itu, nilai impor kumulatif periode Januari-September 2018 tercatat sebesar USD138,77 miliar lebih tinggi dari impor periode yang sama tahun 2017 sebesar USD112,52 miliar, atau meningkat sebesar 14,18 persen. Kondisi perkembangan ini mengakibatkan tekanan pada neraca perdagangan periode Januari-September 2018 yang mengalami defisit sebesar USD3,78 miliar.

**Dalam merespon dinamika perekonomian global, Pemerintah tetap berupaya mengantisipasi risiko-risiko yang ada dan memperkuat fundamental ekonomi ke depan.** Penguatan posisi Transaksi Berjalan tetap akan memperoleh perhatian yang besar. Pemerintah juga tetap berkomitmen untuk melakukan reformasi struktural di sektor riil yang diarahkan untuk meningkatkan daya saing, perbaikan iklim investasi, dan pembangunan infrastruktur strategis untuk menopang pertumbuhan ekonomi.

Halaman Kosong

# PENERIMAAN PAJAK

Sampai Dengan Triwulan III 2018, Penerimaan Pajak Tumbuh 18,72 persen (di luar Tax Amnesty), tertinggi selama empat tahun terakhir

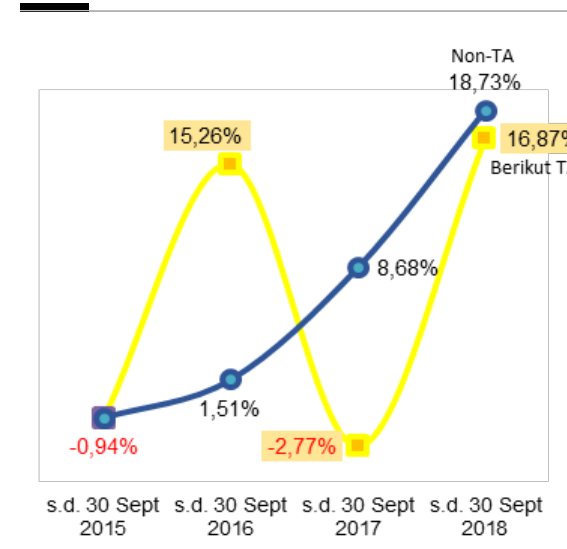
(dalam triliun Rupiah)

Uraian	APBN 2018	Realisasi Januari s.d. September		
		Rp	Δ% 2017 - 2018	% thd APBN
Pajak Penghasilan	855,13	535,58	17,28	62,63
- Migas	38,13	47,59	23,31	124,80
- Non Migas	817,00	487,99	16,72	59,73
PPN & PPnBM	541,80	351,51	14,35	64,88
PBB & Pajak Lainnya	27,06	13,77	104,83	50,90
<b>Jumlah</b>	<b>1.424,00</b>	<b>900,86</b>	<b>16,87</b>	<b>63,26</b>

**R**ealisasi penerimaan pajak untuk periode Januari sampai dengan September 2018 adalah sebesar Rp900,86 triliun. Apabila dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2017, terjadi pertumbuhan sebesar 16,87 persen secara year-on-year, yang merupakan pertumbuhan tertinggi pada periode Januari sampai dengan September selama empat tahun terakhir.

Apabila penerimaan uang tebusan dari program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty/TA) yang sifatnya tidak berulang (one-off) selama bulan Januari - Maret 2017 sebesar Rp.12,03 triliun tidak dimasukkan dalam penghitungan pertumbuhan, realisasi penerimaan periode Januari sampai dengan September 2018 mengalami pertumbuhan sebesar 18,73 persen dibandingkan periode yang sama

Pertumbuhan Penerimaan Pajak (y-o-y) Januari - September 2018



tahun 2017. Pertumbuhan yang positif ini tidak lepas dari tingginya pertumbuhan PPh dan PPN & PPnBM, yang keduanya tumbuh double digit. Apabila dirinci lebih lanjut, PPh Non Migas tumbuh sebesar 16,72 persen, PPh Migas tumbuh sebesar 23,31 persen, PPN & PPnBM tumbuh sebesar 14,35 persen, sedangkan PBB & Pajak Lainnya tumbuh sebesar 104,83 persen.

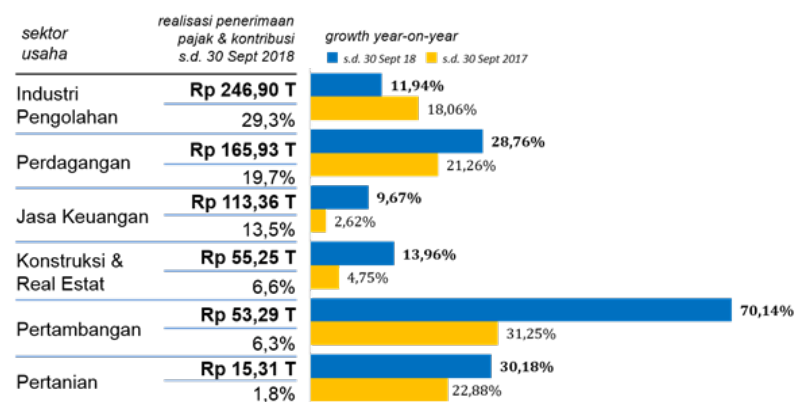
Secara umum pertumbuhan penerimaan pajak tidak lepas dari pertumbuhan jenis-jenis pajak utama yang menunjukkan kinerja cukup menggembirakan. PPh Pasal 25/29 mampu melanjutkan trend pertumbuhan di atas 20 persen sepanjang 2018, dimana PPh Pasal 25/29 Badan mampu tumbuh hingga 25,04 persen sedangkan PPh 25/29 Orang Pribadi tumbuh 21,79 persen. PPh Pasal 21 tumbuh 16,92 persen,

Jenis Pajak	growth y-o-y Jan-Sep 2017	growth y-o-y Jan-Sep 2018
<b>PPh Pasal 21</b>	3,30%	16,92%
<b>PPh Badan</b>	17,21%	25,04%
<b>PPh OP</b>	44,84%	21,79%
<b>PPN Dalam Negeri</b>	12,15%	8,22%
<b>Pajak atas Impor</b>	17,92%	26,79%
- PPh 22 Impor	16,02%	26,20%
- PPN Impor	19,71%	27,52%
- PPNBM Impor	-12,83%	7,16%

jauh lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun 2017 sebesar 3,30 persen. Pertumbuhan paling signifikan dicatatkan oleh pajak-pajak atas impor, melanjutkan trend pertumbuhan tahun 2017. PPh Pasal 22 Impor tumbuh 26,20 persen (naik dari 16,02 persen), PPN Impor tumbuh 27,52 persen (naik dari 19,71 persen) serta PPNBM Impor tumbuh 7,16 persen setelah di tahun 2017 mengalami pertumbuhan negatif (-12,83 persen). Secara umum, pajak atas impor tumbuh 26,79 persen,

lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun 2017 yang tumbuh 17,92 persen.

Terjaganya kinerja positif penerimaan pajak juga tercermin dari penerimaan sektor-sektor usaha utama yang tumbuh cukup bagus. Beberapa industri tumbuh double digits, seperti Industri Pengolahan yang tumbuh 11,94 persen, Perdagangan yang tumbuh 28,76 persen, Pertambangan yang tumbuh 70,14 persen dan Pertanian yang tumbuh 30,18 persen

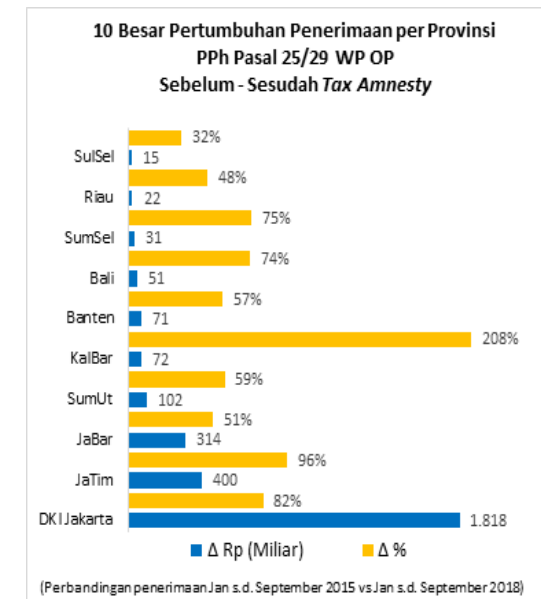
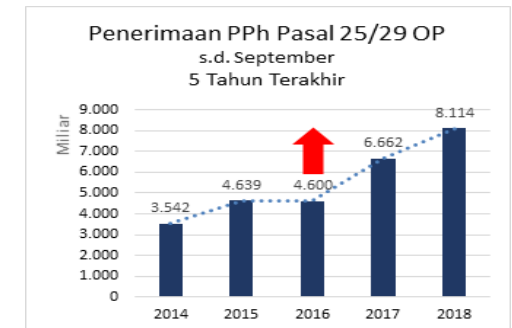


\*Pertumbuhan di luar uang tebusan amnesti pajak, PPh migas, PPh DTP, PBB, PPh Final Revaluasi

### Kepatuhan Meningkat, Penerimaan PPh Pasal 25/29 WP OP Januari - September 2018 Melampaui Total Capaian Tahun 2017

Kinerja penerimaan PPh Pasal 25/29 dari Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) terlihat mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan periode ini. Ini tercermin dari peningkatan setoran PPh Pasal 25/29 OP sampai dengan September 2018 yang telah mencapai Rp8,11 triliun, jauh lebih besar dibandingkan penerimaan pada periode yang sama tahun 2017 sebesar Rp6,66 triliun, terlebih apabila dibandingkan dengan penerimaan sebelum pelaksanaan TA, yang berada di kisaran Rp3,54 - Rp4,64 triliun. Bahkan, saat ini penerimaan PPh OP sampai dengan September (9 bulan) telah melebihi pencapaian realisasi total PPh OP setahun pada tahun lalu (2017), yang mencapai Rp7,81 triliun.

Secara kewilayahan, data penerimaan PPh Pasal 25/29 WP OP menunjukkan adanya peningkatan setoran PPh Pasal 25/29 WP OP sesudah Tax Amnesty dibandingkan dengan sebelum program dilaksanakan, dan umumnya terjadi di provinsi-provinsi dengan kota-kota besar, misalnya DKI Jakarta, Surabaya (Jawa Timur), Bandung (Jawa Barat), dan Medan (Sumatera Utara). Hal ini sejalan dengan hasil Tax Amnesty Juli 2016 - Maret 2017 dimana provinsi-provinsi tersebut mendominasi jumlah peserta maupun besarnya uang tebusan yang dibayarkan.

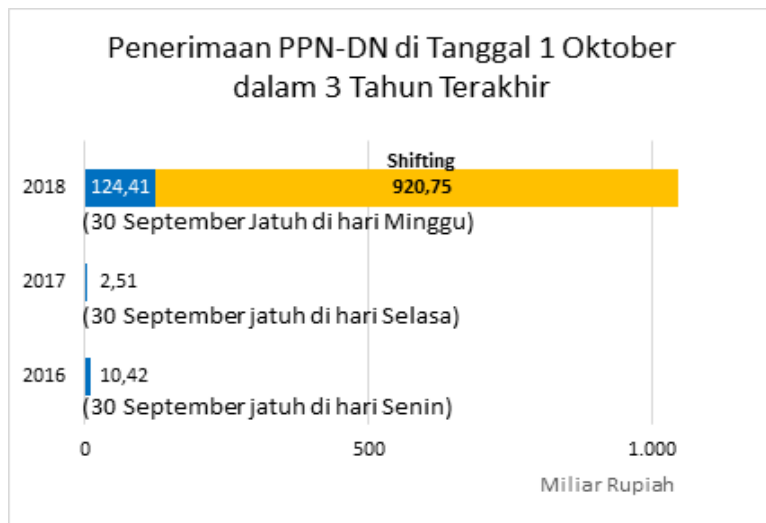


**Jatuh Tempo Pembayaran Bertepatan Hari Libur, Sebagian Penerimaan PPN Bulan September Bergeser ke Bulan Oktober**

Kinerja penerimaan PPN Dalam Negeri periode Januari – September 2018 yang tumbuh 8,22 persen salah satunya dipengaruhi oleh adanya pergeseran pembayaran setoran, terutama pergeseran dari yang seharusnya pada akhir bulan September menjadi awal bulan

Oktober sebesar Rp920,75 miliar. Hal ini disebabkan tanggal jatuh tempo pembayaran PPN Dalam Negeri (30 Setember) bertepatan dengan hari Minggu. Sesuai dengan Pasal 9 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak bahwa dalam hal tanggal jatuh tempo pembayaran bertepatan dengan hari libur, pembayaran atau penyetoran dapat dilakukan paling lambat pada hari kerja berikutnya.

Halaman Kosong



## Pemerintah Beri Keringanan Pajak untuk Wajib Pajak di Donggala dan Palu



Belum surut pujian dunia terhadap Indonesia untuk penyelenggaraan pesta olah raga negara-negara Asia, Asian Games 2018, di Jakarta, dan di tengah persiapan sebagai tuan rumah penyelenggara perhelatan akbar internasional, Asian Para Games 2018 serta World Bank – IMF Annual Meeting 2018, datang berita duka dari bumi Sulawesi. Pada tanggal 28 September 2018, musibah gempa bumi diikuti tsunami dan likuifaksi yang melanda Kabupaten Donggala dan Kota Palu, Sulawesi Tengah. Untuk meringankan beban Wajib Pajak di Donggala dan Palu, Pemerintah memberikan kebijakan keringanan pajak untuk Wajib Pajak yang terkena dampak bencana di Donggala, Palu dan sekitarnya.

Direktorat Jenderal Pajak menetapkan keadaan Kahar (Force Majeure) untuk

wilayah Donggala, Palu dan sekitarnya pada tanggal 28 September sampai dengan 31 Desember 2018. Untuk itu, kepada Wajib Pajak yang berdomisili, bertempat kedudukan dan/atau memiliki tempat kegiatan usaha di Donggala, Palu dan sekitarnya diberikan keringanan pajak berupa:

1. Pengecualian pengenaan sanksi administrasi, atas keterlambatan:
    - pembayaran pajak/utang pajak;
    - pelaporan SPT Tahunan; dan
    - pelaporan SPT Masa;
  2. Pemberian perpanjangan batas waktu untuk pengajuan permohonan:
    - keberatan;
    - pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi; dan
    - pengurangan atau pembatalan SKP atau STP yang kedua;
- sampai dengan 28 Februari 2019, berlaku untuk permohonan yang batas waktu pengajuannya mulai tanggal 28 September 2018 sampai dengan 31 Januari 2019.

Kebijakan ini tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-271/PJ/2018 tentang Kebijakan Perpajakan Sehubungan dengan Bencana Alam Gempa Bumi dan Tsunami di Wilayah Donggala, Palu, dan Sekitarnya. Sebelumnya, Pemerintah juga telah memberikan keringanan serupa kepada Wajib Pajak yang menjadi korban gempa di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB)

Halaman Kosong



# KEPABEANAN DAN CUKAI

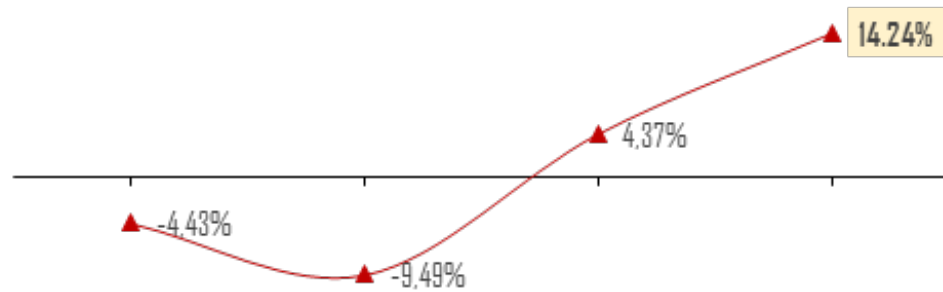
Program Penguatan Reformasi  
Kepabeanan dan Cukai (PRKC)  
meningkatkan penerimaan  
kepabeanan dan cukai di semua  
komponen

(dalam triliun Rupiah)

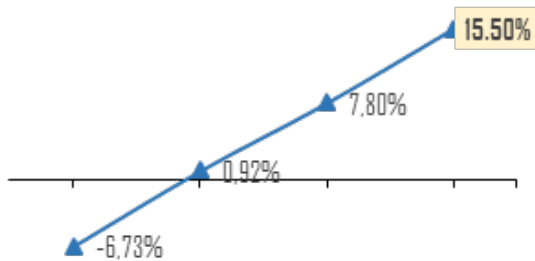
No.	Jenis Penerimaan	Target APBN	Realisasi 2018	% Capaian	Realisasi 2017	Pertumbuhan (y-o-y)		
						Nominal	% 2018	% 2017
1	BEA MASUK	35.70	28.46	79.71	24.64	3.82	15.50	7.80
2	CUKAI	155.40	90.01	57.92	80.96	9.05	11.17	2.96
3	BEA KELUAR	3.00	5.18	172.63	2.63	2.55	96.80	19.19
	TOTAL	194.10	123.64	63.70	108.23	15.41	14.24	4.37
	PPN Impor		133.83		104.95	28.88	27.52	19.71
	PPn BM Impor		3.17		2.96	0.21	7.16	-12.83
	PPh Pasal 22 Impor		40.58		32.15	8.42	26.20	16.02
	Total PDRI lainnya		177.58		140.06	37.52	26.79	17.92
<b>TOTAL DJBC + PERPAJAKAN</b>			<b>301.22</b>		<b>248.29</b>	<b>52.93</b>	<b>21.32</b>	<b>11.60</b>

**P**enerimaan kepabeanan dan cukai hingga bulan September 2018 masih memberikan sinyal positif, hal tersebut nampak dari kinerja penerimaan yang konsisten tumbuh *double digit*. Pertumbuhan penerimaan sampai dengan bulan September 2018, mengindikasikan bahwa performa penerimaan kepabeanan dan cukai terus membaik dibandingkan 3 tahun

Pertumbuhan Penerimaan Total s.d Sep 2015-2018



Pertumbuhan BM s.d Sep 2015-2018



sebelumnya yang hanya mampu tumbuh 1 digit bahkan sempat mengalami pertumbuhan negatif selama 2 tahun berturut-turut.

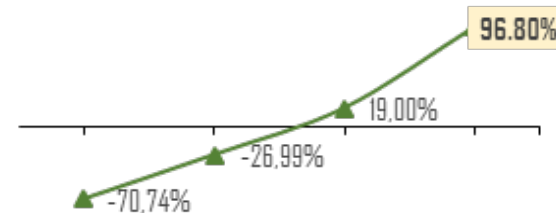
Peningkatan perdagangan internasional dan berbagai perbaikan kebijakan kepabeanan dan cukai seperti penertiban impor, cukai dan ekspor berisiko tinggi (PICE-BT) yang merupakan bagian dari program PRKC, turut berkontribusi pada capaian tersebut. Pertumbuhan positif penerimaan juga didukung oleh kebijakan tarif yang efektif, membaiknya kegiatan ekspor dan impor, serta membaiknya harga komoditas internasional.

Penerimaan Bea Masuk (BM) tumbuh positif dengan nilai pertumbuhan *double digit*, dibanding tahun lalu.

Pertumbuhan BM hingga bulan September 2018, meneruskan tren positif penerimaan BM selama 3 tahun yang selalu lebih baik dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Capaian penerimaan ini terdiri dari penerimaan rutin dan *extra effort*, yang masing-masing tumbuh sebesar 15,38 persen dan 14,90 persen. Aktifitas impor yang tumbuh sebesar 15,01 persen yang didukung program PIBT, menjadi faktor utama tumbuhnya penerimaan BM meskipun masih terus dibayangi oleh peningkatan utilisasi *Free Trade Agreement* (FTA) sebesar 2,1 persen.

Pertumbuhan impor yang menjadi pendorong penerimaan BM, didominasi oleh importasi untuk sektor Industri Pengolahan (manufaktur) yang tumbuh 13,51 persen. Tumbuhnya impor pada sektor yang produktif tersebut memberi indikasi bahwa aktifitas industri nasional masih berlanjut.

Pertumbuhan BK s.d Sep 2015-2018

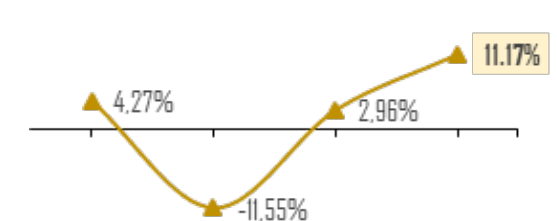


Kinerja penerimaan Bea Keluar (BK) masih yang terbaik, dimana pertumbuhannya merupakan yang tertinggi dibandingkan komponen penerimaan lainnya. Alhasil, dengan pertumbuhan yang luar biasa tersebut penerimaan BK telah berhasil melampaui target yang ditetapkan pada APBN 2018.

Performa penerimaan BK tidak lepas dari kenaikan volume ekspor pada komoditas minerba yang pertumbuhannya mencapai 161,72 persen. Relatif stabilnya harga komoditas terutama mineral di pasar internasional dan tingginya permintaan mitra dagang utama, menjadi faktor utama pendorong pertumbuhan penerimaan dari komoditas minerba.

Perolehan penerimaan cukai hingga bulan September 2018, merupakan perolehan penerimaan yang terbesar dibandingkan komponen penerimaan lain. Penerimaan cukai, kontributor terbesarnya berasal dari cukai hasil tembakau (CHT) disusul kemudian

Pertumbuhan Cukai s.d Sep 2015-2018



oleh minuman mengandung etil alkohol (MMEA) dan etil alkohol (EA).

Penerimaan CHT sebagai penyumbang penerimaan tertinggi cukai, didorong oleh kenaikan tarif efektif sebesar 10,79 persen atau lebih tinggi dibandingkan kenaikan rata-rata tarif yang 10,04 persen. Program PCBT turut berpengaruh positif terhadap penerimaan CHT, dimana mampu mengurangi peredaran rokok ilegal. Indikasi positif terlihat dari peningkatan produksi hasil tembakau (HT) sebesar 2,18 persen, sebagai dampak pemenuhan permintaan pasar yang sebelumnya dipenuhi produk rokok ilegal.

Sama halnya dengan HT, dampak positif PCBT juga terjadi pada MMEA yang mengalami peningkatan produksi baik yang berasal dari dalam negeri maupun impor. Peningkatan produksi MMEA yang masing-masing tumbuh sebesar 8,36 persen dan 36,48 persen, merupakan indikasi pemenuhan permintaan konsumsi yang sebelumnya dibanjiri oleh MMEA ilegal.

## “Kerja Cerdas, Berintegritas, Menuju Lepas Landas” Dirgahayu Bea Cukai ke-72



**T**anggal 1 Oktober, pada 72 tahun yang lalu telah dibentuk suatu organisasi dengan nama “Pejabatn Bea dan Cukai”.

Selang 2 tahun kemudian, tepatnya tahun 1948 organisasi tersebut diubah namanya menjadi “Jawatan Bea dan Cukai”, yang hingga saat ini dikenal dengan nama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).

Perjalanan panjang transformasi organisasi telah membawa DJBC pada pintu gerbang sebuah era, yaitu era lepas landas pada tahun 2019 menuju DJBC yang modern. Perjalanan yang dimulai dengan program reformasi birokrasi pada tahun 1995, yang

dilanjutkan kemudian dengan penguatan reformasi pada tahun 2016.

Dikatakan sebagai era lepas landas, karena DJBC diyakini telah mendapatkan momentum yang tepat untuk benar-benar terlepas dari stigma negatif yang ada di masa lalu, dan momentum untuk mendapatkan kepercayaan penuh dari masyarakat akan kredibilitas institusi DJBC.

Penertiban Impor/Ekspor/Cukai Berisiko Tinggi (PICE BT), Program Sinergi dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), serta program-program lain dalam rangka pembenahan di

sektor fasilitasi, pengawasan dan pelayanan turut membentuk institusi ini menjadi lebih kredibel dan terpercaya di mata masyarakat.

Program PIBT, merupakan gendeng perang yang ditabuh DJBC kepada para importir “nakal”, mampu memberikan dampak yang signifikan terhadap kinerja institusi maupun kepatuhan pengguna jasa. Indikasinya adalah membaiknya tax base dan pajak dalam rangka impor (PDRI), yang diikuti turunnya aktivitas importasi berisiko tinggi hingga saat ini.

Terobosan program sinergi DJBC – DJP, dilakukan dalam rangka peningkatan kepatuhan pelaku usaha serta optimalisasi penerimaan. Sinergi dilaksanakan melalui kegiatan joint analisis, joint audit, joint collection, dan joint investigation. Alhasil, program sinergi ini telah mampu menghasilkan tambahan penerimaan sebesar lebih dari Rp11 triliun dari target sebesar Rp20 triliun, sampai dengan bulan September 2018.

Setelah berhasil mencapai target penerimaan pada tahun 2017 lalu, kinerja penerimaan DJBC terus melanjutkan tren positif di tahun 2018. Kontribusi DJBC dalam mendukung APBN 2018 hingga bulan September 2018 adalah sebesar Rp301,22 triliun atau hampir 30 persen dari penerimaan perpajakan nasional, yang didapat dari penerimaan Bea Masuk (BM), Bea Keluar (BK), Cukai dan PDRI lainnya.

Peran sebagai Industrial Assistance dan Trade Facilitator, ditempuh DJBC melalui serangkaian terobosan seperti pengembangan Pusat Logistik Berikat (PLB), perluasan penerima fasilitas Authorized Economic Operator (AEO), pembentukan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) untuk Industri Kecil dan Menengah, serta simplifikasi aturan perizinan di bidang kepabeanan dan cukai. Langkah-langkah tersebut dilakukan agar Indonesia mampu menjawab tantangan perekonomian global, sekaligus turut mendorong pertumbuhan industri dalam negeri dan perekonomian nasional.

Peran Community Protector, dilaksanakan dengan kegiatan pemberantasan perdagangan ilegal yang semakin gencar. Penindakan atas penyelundupan pada kegiatan impor, peredaran rokok dan minuman keras ilegal, hingga narkoba yang mengancam generasi penerus bangsa.

Upaya-upaya yang dilakukan di atas, baik dari sisi penertiban, pengawasan, pemberian fasilitasi, hingga terobosan berupa kemudahan dan percepatan layanan, merupakan pesan DJBC kepada masyarakat bahwa “Legal Itu Mudah”.

Dirgahayu DJBC, doakan kami agar sanggup untuk terus menjaga komitmen yang tinggi, bekerja cerdas dan berintegritas demi mewujudkan Bea Cukai Makin Baik, Kementerian Keuangan makin baik, dan bangsa Indonesia yang makin baik.

# PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)

Capaian PNBP hingga September 2018 Telah Mencapai 102,16 persen dari Target Didorong oleh Kenaikan Harga ICP dan HBA.

Sampai dengan tanggal 30 September 2018, realisasi PNBP mencapai Rp281,37 triliun atau 102,16 persen dari APBN tahun 2018. Realisasi tersebut mengalami pertumbuhan sebesar 27,13 persen jika dibandingkan dengan realisasi periode yang sama tahun 2017. Kenaikan ini antara lain disebabkan meningkatnya harga komoditas, khususnya harga minyak bumi dan batu bara pada tahun 2018. Realisasi penerimaan SDA Migas mencapai Rp94,15 triliun atau 117,17 persen dari targetnya dalam APBN tahun 2018. Realisasi tersebut mengalami pertumbuhan sebesar 53,90 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2017. Kenaikan penerimaan SDA Migas tersebut antara lain disebabkan karena lebih tingginya rata-rata realisasi ICP periode bulan Desember 2017 - September 2018, yaitu sebesar USD 67,53 per barel atau periode bulan

Januari - September 2018 sebesar USD 68,25 per barel, dibandingkan rata-rata realisasi ICP bulan bulan Desember 2016 - September 2017, yaitu sebesar USD 49,09 per barel atau periode bulan Januari - September 2017 sebesar USD 48,86 per barel.

Realisasi penerimaan SDA Non Migas mencapai Rp26,81 triliun atau 114,95 persen dari target APBN tahun 2018. Realisasi tersebut lebih tinggi 32,21 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2017 yang mencapai Rp20,28 triliun. Peningkatan ini diantaranya disebabkan oleh kenaikan rata-rata harga batubara acuan (HBA) pada periode Januari - September 2018 yang mencapai USD 99,58 per ton, lebih tinggi dibandingkan HBA periode yang sama tahun sebelumnya yaitu sebesar USD 83,13 per ton.

Realisasi pendapatan dari kekayaan negara dipisahkan mencapai Rp41,12 triliun atau 92,01 persen dari target APBN tahun 2018. Realisasi tersebut lebih tinggi 5,82 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2017 yang mencapai Rp38,86 triliun. Peningkatan ini diantaranya disebabkan perbaikan kinerja BUMN.

Realisasi penerimaan PNBP Lainnya mencapai Rp79,78 triliun atau 95,26 persen dari target APBN tahun 2018. Realisasi tersebut meningkat sebesar 18,58 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2017 sebesar Rp67,28 triliun. Peningkatan realisasi penerimaan PNBP Lainnya ini antara lain disebabkan kenaikan realisasi Penjualan Hasil Tambang yang mencapai Rp13,97 triliun, lebih tinggi dibandingkan realisasi periode yang sama tahun 2017 sebesar Rp11,45

triliun, sejalan dengan peningkatan HBA dan kenaikan Pendapatan Penggunaan Spektrum dan Frekuensi Radio yang mencapai Rp13,56 triliun, lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun 2017 yaitu sebesar Rp3,96 triliun, yang disebabkan perubahan kebijakan (re-profiling) waktu pembayaran Biaya Hak Penggunaan pita frekuensi dari bulan Desember menjadi bulan September.

Untuk pendapatan BLU, hingga 30 September 2018 terealisasi sebesar Rp39,50 triliun, atau mencapai 91,22 persen dari target APBN tahun 2018, meningkat 17,14 persen dari realisasi periode yang sama tahun 2017 yaitu sebesar Rp33,72 triliun.

REALISASI PNBP  
TAHUN ANGGARAN 2018  
s.d Akhir September 2018

(dalam miliar Rupiah)

	2018		Realisasi	
	APBN	s.d. 30 Sept	% thd APBN	% Growth (yoy)
I. Penerimaan Negara Bukan Pajak	275.427,92	281.368,27	102,16	27,13
A. Penerimaan SDA	103.674,80	120.961,27	116,67	48,50
1 Migas	80.349,00	94.147,39	117,17	53,90
a Minyak Bumi	59.582,70	94.147,39	158,01	53,90
b Gas Alam	20.766,30	-	-	-
2 Non Migas	23.325,80	26.813,88	114,95	32,21
a Pertambangan Minerba	17.858,52	22.078,57	123,63	32,28
b Kehutanan	4.166,71	3.309,38	79,42	22,79
c Perikanan	600,00	281,72	46,32	(22,06)
d Pend. Per. Panas Bumi	700,59	1.144,21	163,32	114,32
B Pendapatan dari KND	44.695,40	41.123,81	92,01	5,82
C. PNBP Lainnya	83.753,12	79.780,55	95,26	18,58
D. Pendapatan BLU	43.304,60	39.502,65	91,22	17,14

# BELANJA PEMERINTAH PUSAT

Persentase penyerapan Belanja Pemerintah Pusat (BPP) hingga akhir September 2018 utamanya dipengaruhi oleh percepatan penyaluran belanja Bantuan Sosial.

(dalam triliun Rupiah)

Belanja Pemerintah Pusat (triliun Rupiah)	2018			
	APBN	Realisasi s.d. 30 September	% thd APBN	% Growth (yoy)
<b>Belanja K/L</b>	<b>847,44</b>	<b>511,46</b>	<b>60,35</b>	<b>13,62</b>
Belanja Pegawai	227,46	164,85	72,47	9,71
Belanja Barang	338,83	194,00	57,25	16,45
Belanja Modal	203,88	89,85	44,07	(0,82)
Bantuan Sosial	77,26	62,77	81,24	46,93
<b>Belanja Non K/L</b>	<b>607,06</b>	<b>427,32</b>	<b>70,39</b>	<b>19,27</b>
al. Pembayaran Bunga Utang	238,61	197,84	82,91	14,05
Subsidi	156,23	123,41	78,99	33,61
<b>Jumlah</b>	<b>1.454,49</b>	<b>938,78</b>	<b>64,54</b>	<b>16,12</b>

**P**emanfaatan BPP senantiasa terus dioptimalkan baik dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan maupun penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. Dalam mendukung penyelenggaraan kegiatan pemerintahan tersebut perlu dilaksanakan prinsip-prinsip, yaitu: efisiensi,

efektivitas, perbaikan tata kelola pemerintahan (good governance) dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu, Pemerintah telah melaksanakan berbagai kebijakan melalui BPP guna mendorong tercapai hal tersebut yang diwujudkan melalui pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas SDM, perbaikan kualitas

pelayanan kepada masyarakat, perluasan perlindungan sosial, peningkatan kedaulatan pangan dan energi, serta percepatan pembangunan infrastruktur.

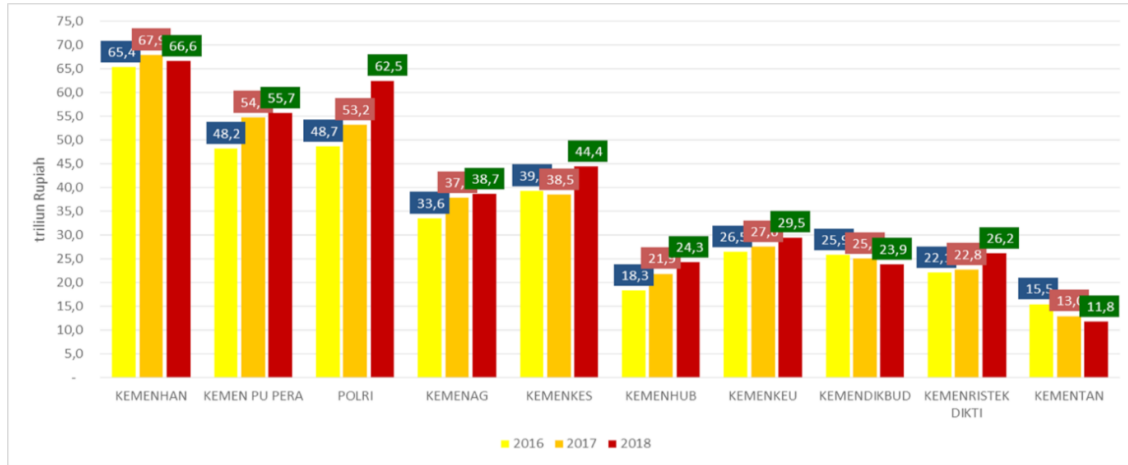
Realisasi BPP pada bulan September 2018 telah mencapai Rp136,61 triliun atau sekitar 9,39 persen dari pagu alokasi APBN 2018. Sedangkan realisasi BPP sampai dengan 30 September 2018 telah mencapai Rp938,78 triliun atau 64,54 persen dari pagu alokasi APBN 2018.

Realisasi BPP tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2017.

Realisasi anggaran BPP dikelompokkan dalam dua bagian, terdiri atas (1) realisasi belanja K/L sebesar Rp511,46 triliun atau 60,35 persen dari pagu alokasi APBN tahun 2018; dan (2) realisasi belanja non-K/L sebesar Rp427,32 triliun atau 70,39 persen dari pagu alokasi APBN tahun 2018. Kinerja realisasi BPP tersebut menunjukkan perbaikan apabila dibandingkan dengan kinerja realisasi pada periode yang sama tahun 2017. Hal tersebut dipengaruhi antara lain: kemajuan implementasi program-program yang dilaksanakan oleh K/L, yang dalam tahun 2018 terus didorong percepatan

pelaksanaannya, dan pencairan dana cadangan program JKN, serta penanggulangan pasca bencana alam di Lombok.

Selama bulan September 2018 terdapat pengeluaran BPP yang relatif besar, antara lain untuk penanggulangan pasca bencana alam, yaitu gempa bumi Lombok 5 Agustus 2018 yang berkekuatan 7 Mw, sehingga Pemerintah harus memberikan bantuan dan perlindungan kepada masyarakat terdampak. Pemerintah telah menyiapkan anggaran dan melakukan pencairan dana untuk penanggulangan pasca bencana alam. Penanggulangan bencana alam tersebut dipergunakan untuk memberikan bantuan stimulan rumah bagi 42.115 unit rumah di Lombok, terdiri atas 23.347 unit rumah rusak berat, 4.478 unit rumah rusak sedang, dan 14.392 unit rumah rusak ringan. Selain itu, untuk menangani bencana di Lombok, Pemerintah melalui kementerian/lembaga telah merealisasikan bantuan logistik, santunan ahli waris, paket sembako, dapur umum, logistik kesehatan lingkungan, obat-obatan, logistik gizi bantuan, guru, pembelajaran, serta menyediakan saran umum sementara.



GRAFIK PENYERAPAN BELANJA 10 K/L DENGAN PAGU TERBESAR

### REALISASI BELANJA K/L TAHUN 2018

Realisasi pada Belanja K/L sampai dengan 30 September 2018 mencapai Rp511,46 triliun atau 60,35 persen dari pagu alokasi APBN 2018. Realisasi belanja K/L tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi belanja K/L pada periode yang sama tahun 2017. Faktor-faktor yang diindikasikan memengaruhi penyerapan belanja K/L antara lain: kelanjutan kebijakan percepatan pelaksanaan kegiatan melalui lelang dini terutama pada K/L yang memiliki belanja modal yang besar, kepatuhan dalam pengajuan tagihan ke kas negara sesuai norma waktu, perbaikan mekanisme penyaluran bantuan sosial melalui penyaluran

non-tunai dan menyediakan pusat layanan sebagai counterparts bagi K/L dalam konsultasi revisi anggaran, serta pelaksanaan beberapa agenda strategis seperti Pilkada serentak, pertemuan tahunan IMF dan World Bank di Bali, dan pelaksanaan Asian Games dan Para Games tahun 2018.

Realisasi penyerapan belanja barang sampai dengan 30 September 2018 telah mencapai Rp194,00 triliun atau mencapai 57,25 persen dari alokasi APBN tahun 2018. Realisasi penyerapan belanja barang tersebut lebih tinggi bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2017. Selain itu, terjadi kenaikan pagu APBN untuk belanja barang tahun 2018 lebih besar daripada tahun sebelumnya. Kenaikan tersebut disebabkan

### CAPAIAN BEBERAPA OUTPUT STRATEGIS K/L TAHUN 2018

Kementerian/Lembaga	Target		Realisasi		
	Anggaran (Miliar Rp)	Fisik	s.d Agustus	s.d. September	
			Fisik	Keuangan (Miliar Rp)	Fisik
<b>KEMEN PUPR</b>					
Pembangunan Jalan Baru (km)	6.539,1	811,5	335,6	1.935,8	358,3
Pembangunan Jalan Tol (km)	2.183,9	33,1	18,6	2.999,2	20,5
Pembangunan Jembatan (m)	3.631,7	9.708,9	4.399,2	1.010,0	4.883,3
Pembangunan Fly Over/Underpass (m)	658,4	2.420,4	1.185,3	357,7	1.281,1
<b>KEMENHUB</b>					
Pembangunan Bandara	45,4	4	3	24,1	4
Pembangunan Rel KA (km'sp)	16.513,5	366,6	236,2	8.704,0	298,6

Catatan:  
\*) Empat Bandara sudah dapat beroperasi, namun realisasi keuangannya hanya sebesar 53% karena masih terdapat pekerjaan lanjutan

sistem akuntansi pencatatan aset yang belum/tidak diserahkan kepada Pemerintah Pusat, maka pengeluaran tersebut akan dicatat dalam belanja barang sehingga terjadi pergeseran dari belanja modal kepada belanja barang, antara lain belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat/ Pemda, dan belanja dekonsentrasi/ tugas pembantuan.

Realisasi penyerapan belanja modal sampai dengan 30 September 2018 mencapai Rp89,85 triliun atau 44,07 persen dari alokasi APBN tahun 2018. Realisasi penyerapan belanja

modal tahun 2018 tersebut lebih tinggi bila dibandingkan periode yang sama tahun 2017, namun pagu anggaran belanja modal mempunyai pertumbuhan tidak positif tahun 2018. Hal tersebut disebabkan oleh sistem pencatatan akuntansi seperti yang dijelaskan di atas. Meskipun penyerapan anggaran belanja modal relatif lambat, namun perkembangan fisiknya tidak selalu sama dengan perkembangan penyerapan anggaran. Sebagai contoh, perkembangan fisik untuk proyek-proyek pada Kementerian PUPERA dan Kementerian Perhubungan relatif

REALISASI BELANJA DI 15 K/L DENGAN PAGU TERBESAR

(dalam triliun Rupiah)

No.	KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA	2017			2018		
		APBNP	Realisasi s.d. 30 Sept	% thd APBNP	APBN	Realisasi s.d. 30 Sept	% thd APBN
1	KEMENHAN	114,82	67,91	59,15	114,82	67,91	59,15
2	KEMEN PU PERA	104,24	54,81	52,58	104,24	54,81	52,58
3	POLRI	98,22	53,25	54,21	98,22	53,25	54,21
4	KEMENAG	63,49	37,91	59,71	63,49	37,91	59,71
5	KEMENKES	55,86	38,52	68,95	55,86	38,52	68,95
6	KEMENHUB	44,64	21,91	49,07	44,64	21,91	49,07
7	KEMENKEU	40,54	27,58	68,03	40,54	27,58	68,03
8	KEMENDIKBUD	17,32	12,60	72,76	17,32	12,60	72,76
9	KEMENRISTEK DIKTI	39,49	22,81	57,76	39,49	22,81	57,76
10	KEMENTAN	37,97	25,10	66,10	37,97	25,10	66,10
11	KEMENSOS	24,15	12,99	53,78	24,15	12,99	53,78
12	KEMENKUMHAM	11,21	6,16	54,95	11,21	6,16	54,95
13	KKP	8,18	5,84	71,37	8,18	5,84	71,37
14	MA	9,14	2,66	29,06	9,14	2,66	29,06
15	KEMENLU	7,17	4,24	59,22	7,17	4,24	59,22
	15 K/L dengan Pagu Terbesar	676,43	394,26	58,29	676,43	394,26	58,29
	K/L Lainnya	122,16	55,47	45,41	122,16	55,47	45,41
	JUMLAH	798,59	449,73	56,32	798,59	449,73	56,32

lebih cepat daripada perkembangan penyerapan anggarannya. Hal ini memberikan indikasi bahwa sampai akhir tahun 2018, diperkirakan Kementerian PUPERA dan Kementerian Perhubungan dapat memenuhi target output-nya.

Untuk mendukung penguatan belanja yang lebih produktif, Pemerintah konsisten melakukan kebijakan capping belanja barang dengan tetap menjaga pencapaian target output dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Untuk

mendukung hal tersebut, Pemerintah mengedepankan konsep value for money (VFM) sebagai bentuk tanggung jawab Pemerintah dalam membelanjakan anggarannya. Diharapkan dalam setiap rupiah anggaran belanja yang dikeluarkan Pemerintah, diupayakan dapat menghasilkan output yang lebih berkualitas, dan lebih penting adalah masyarakat dapat merasakan manfaatnya dari pengeluaran anggaran tersebut. Dengan pelaksanaan capping belanja barang tersebut, diharapkan APBN sebagai

instrumen fiskal dapat secara lebih optimal menstimulasi perekonomian meskipun di tengah keterbatasan ruang fiskal Pemerintah.

Realisasi penyerapan anggaran pada 15 K/L dengan pagu terbesar sampai dengan 30 September 2018 mencapai Rp435,66 triliun atau mencapai 61,79 persen dari alokasi pagu alokasi APBN 2018. Realisasi penyerapan anggaran tersebut lebih baik dibandingkan dengan realisasi pada periode yang sama tahun 2017. Dari 15 K/L dengan pagu terbesar tersebut terdapat

sepuluh K/L yang memiliki kinerja penyerapan belanja di atas rata-rata nasional sebesar 60,35 persen, yaitu: (1) Kementerian Pertahanan, (2) Kepolisian RI, (3) Kementerian Agama, (4) Kementerian Kesehatan, (5) Kementerian Keuangan, (6) Kementerian Sosial, (7) Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, (8) Kementerian Hukum dan HAM, (9) Mahkamah Agung, dan (10) Kementerian Luar Negeri.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui faktor-faktor yang



berpengaruh besar terhadap penyerapan belanja K/L, antara lain: percepatan penyaluran beberapa komponen program perlindungan sosial, seperti alokasi untuk penerima bantuan iuran dalam rangka jaminan kesehatan nasional. Meskipun analisis secara kinerja menunjukkan tingkat optimisme dalam pencapaian target output maupun target penyerapan anggaran, namun dalam pelaksanaan masih terdapat beberapa hal yang bisa memengaruhi penyerapan belanja K/L, antara lain: (1) perubahan prosedur dan mekanisme lelang dalam rangka meningkatkan

akuntabilitas; (2) beberapa paket multiyears contract baru dalam proses lelang; (3) masih menghadapi permasalahan dalam pembebasan lahan untuk beberapa proyek, serta (4) belum selesainya proses verifikasi, validasi, dan administrasi untuk beberapa kegiatan di K/L.

Selain capaian penyerapan anggaran, kinerja K/L juga dapat dilihat dari capaian output strategis di beberapa K/L. Berikut ini menunjukkan capaian output strategis beberapa K/L di bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, sebagai berikut.

s.d. September 2018

Kementerian Lembaga	Target		Realisasi		
	Output Strategis	Anggaran (Juta Rupiah)	Output	Anggaran (Juta Rupiah)	Output
<b>KEMENDIKBUD</b>					
	Penyaluran KIP (siswa)	9.646.127,0	17,9 juta	6.609.407	12,7 juta
	Rehab/bangun ruang kelas	1.269.051,0	24,7 ribu	1.362.557	20,2 ribu
<b>KEMENAG</b>					
	Penyaluran KIP (siswa)	1.181.191,0	1,7 juta	446.464	593.540
	Penyaluran BOS (siswa)	46.695.530,0	8,7 juta	7.321.667	6.245.561
	Penyaluran Bidik Misi (mahasiswa)	319.999,5	32 ribu	193.290	12.601
<b>KEMENRISTEKDIKTI</b>					
	Penyaluran Bidik Misi (mahasiswa)	3.764.798,3	368.961	3.032.696	277.115
<b>KEMENKES</b>					
	Penyaluran JKN-KIS (jiwa)	25.502.400,0	92,4 juta	25.474.000	92,3 juta
<b>KEMENSOS</b>					
	Penyaluran PKH (KPM)	19.251.754,9	10,0 juta	15.890.051	9,9 juta
	Bantuan Pangan	20.831.137,9	15,6 juta	11.649.5307	15,2 juta

## REALISASI BELANJA NON K/L TAHUN 2018

Kinerja realisasi pada belanja non-K/L sampai dengan 30 September 2018 mencapai Rp427,32 triliun atau mencapai 70,39 persen dari pagu alokasi APBN tahun 2018. Realisasi belanja non-K/L tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2017. Peningkatan kinerja penyerapan belanja non-K/L dipengaruhi, antara lain: (1) realisasi pembayaran bunga utang yang dipengaruhi depresiasi nilai tukar rupiah terhadap mata uang US dolar, dan kenaikan yield SBN; (2) realisasi pembayaran belanja pegawai untuk pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) bagi para pensiunan; serta (3) realisasi program pengelolaan subsidi sebagai dampak peningkatan ICP dan depresiasi nilai tukar rupiah terhadap mata uang US dolar, serta pembayaran kurang bayar untuk subsidi energi tahun sebelumnya dilakukan pada Semester I Tahun 2018. Meskipun demikian, perkembangan belanja subsidi selama periode 2014 – 2017 menunjukkan penurunan terutama dipengaruhi oleh pelaksanaan reformasi kebijakan subsidi energi, misalnya perbaikan skema penyaluran subsidi agar lebih tepat sasaran (penerima manfaat subsidi) dan pemberian subsidi terbatas untuk minyak solar.

# TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA

Penyaluran TKDD hingga akhir Triwulan III 2018 on-track, yang didorong oleh kinerja penyaluran DAK Fisik maupun DAK Nonfisik

**A**lokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) pada APBN Tahun Anggaran 2018 yang ditetapkan sebesar Rp766,16 triliun, telah terealisasi sebesar Rp573,77 triliun (74,89 persen dari pagu alokasi TKDD) sampai dengan 30 September 2018. Realisasi penyaluran ini lebih tinggi Rp7,20 triliun jika dibandingkan dengan penyaluran TKDD pada periode yang sama tahun 2017 sebesar Rp566,57 triliun (73,93 persen dari pagu alokasi). Secara umum, capaian tersebut dipengaruhi oleh realisasi Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik) dan Dana Alokasi Khusus Nonfisik (DAK Nonfisik) yang mengalami peningkatan cukup signifikan dibandingkan realisasi tahun 2017.

## Dana Perimbangan

Komponen terbesar dari TKDD adalah Dana Perimbangan, yang pada APBN Tahun Anggaran (TA) 2018 dianggarkan sebesar Rp676,60 triliun

atau 88,31 persen dari keseluruhan alokasi TKDD. Dana Perimbangan terdiri atas Dana Transfer Umum (DTU) sebesar Rp490,71 triliun, dan Dana Transfer Khusus (DTK) sebesar Rp185,89 triliun. Sampai dengan tanggal 30 September 2018, realisasi Dana Perimbangan mencapai Rp514,56 triliun atau 76,05 persen dari pagu dalam APBN TA 2018. Realisasi tersebut lebih tinggi sebesar Rp10,04 triliun dibandingkan dengan realisasi pada periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai Rp504,53 triliun, atau 74,35 persen dari pagu alokasi APBN TA 2017.

## Dana Transfer Umum (DTU)

DTU terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU). Dinamakan sebagai transfer umum karena sifatnya yang relatif bebas digunakan oleh daerah sesuai kebutuhan dan prioritas daerah. DTU mempunyai peranan yang sangat penting bagi APBD karena merupakan

penopang utama penyelenggaraan pemerintahan daerah dan layanan umum daerah. Sampai dengan 30 September 2018, realisasi Dana Transfer Umum (DTU) mencapai Rp391,38 triliun, atau 79,76 persen dari pagu anggaran DTU yang ditetapkan dalam APBN 2018 sebesar Rp490,71 triliun. Capaian tahun ini sedikit menurun jika dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 80,95 persen dari pagu alokasi.

## Dana Alokasi Umum (DAU)

Kinerja realisasi penyaluran DAU relatif sama dari tahun ke tahun, karena disalurkan secara rutin sebesar 1/12 setiap bulannya. Sampai dengan 30 September 2018, realisasi penyaluran DAU telah mencapai Rp334,16 triliun, lebih tinggi sebesar Rp1,85 triliun bila dibandingkan dengan realisasinya pada periode yang sama tahun 2017 sebesar Rp332,31 triliun. Realisasi penyaluran DAU hingga 30 September 2018

dipengaruhi oleh adanya penundaan penyaluran DAU, yakni: (i) sebesar Rp256,36 miliar terhadap 43 daerah yang belum menyampaikan laporan informasi keuangan daerah (IKD), (ii) sebesar Rp1,64 miliar terhadap 1 daerah yang belum menyampaikan laporan belanja infrastruktur, dan (iii) sebesar Rp 151,45 miliar terhadap 15 daerah yang belum menyampaikan komitmen pengalokasian Alokasi Dana Desa (ADD). Selain itu, realisasi penyaluran DAU tersebut juga telah memperhitungkan: (i) penyelesaian kewajiban tunggakan iuran jaminan kesehatan kepada Badan Penyelangan Jaminan Sosial (BPJS) oleh 16 daerah sebesar Rp20,18 miliar, dan (ii) penyaluran kembali DAU sebesar Rp144,51 miliar kepada 29 daerah yang telah menyampaikan laporan IKD.

## Dana Bagi Hasil (DBH)

Berbeda dengan kinerja realisasi penyaluran DAU yang relatif stabil,

kinerja realisasi penyaluran DBH seringkali berfluktuasi antar-tahun. Hal ini terutama disebabkan adanya mekanisme penyelesaian Kurang Bayar dan/atau Lebih Bayar DBH. Pada APBN tahun 2018, pagu anggaran DBH ditetapkan sebesar Rp89,22 triliun, atau Rp6,15 triliun lebih rendah bila dibandingkan pagu alokasi tahun sebelumnya sebesar Rp95,38 triliun. Hingga 30 September 2018, realisasi penyaluran DBH mencapai Rp57,21 triliun, atau 64,12 persen dari pagu alokasi dalam APBN 2018. Menurun jika dibandingkan dengan realisasi tahun lalu yang sebesar 70,79 persen dari pagu alokasi dalam APBNP 2017, hal tersebut antara lain dipengaruhi oleh:

Adanya penyaluran Kurang Bayar DBH TA 2015 sebesar Rp10,85 triliun yang disalurkan pada bulan Februari 2017, sehingga realisasi penyaluran DBH tahun 2017 relatif besar; dan

Perubahan pola Penyaluran DBH triwulan I dan triwulan II 2018, yang semula sebesar 25 persen dari pagu, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 50/PMK.07/2017, diubah menjadi sebesar 20 persen dari pagu, sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 112/PMK.07/2017.

Penurunan besaran penyaluran pada triwulan I dan triwulan II tersebut bertujuan untuk mengurangi potensi terjadinya Kurang Bayar dan/

atau Lebih Bayar DBH yang harus diselesaikan pada tahun anggaran berikutnya.

Terdapat penundaan penyaluran DBH SDA Kehutanan triwulan III 2018 untuk 249 daerah sebesar Rp304,7 miliar, karena belum memenuhi persyaratan penyaluran DBH triwulan III berupa laporan penggunaan DBH Dana Reboisasi (DR) semester I, sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 230/PMK.07/2017 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi DBH SDA Kehutanan DR.

Ketentuan penyampaian laporan penggunaan DBH DR dimaksud pada tahun 2017 belum menjadi persyaratan penyaluran DBH Kehutanan.

Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang APBN 2018 disebutkan bahwa Penerimaan DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) digunakan untuk mendanai program sesuai Undang-undang nomor 39 tahun 2007 tentang Cukai dengan prioritas pada bidang kesehatan yang mendukung Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Berdasarkan laporan realisasi penggunaan DBH CHT semester I 2018, program pembinaan lingkungan sosial menempati alokasi terbesar yaitu sebesar 85,47 persen yang bertujuan untuk mengatasi dampak kesehatan/sosial akibat konsumsi rokok. Dalam program

ini, kegiatan di bidang kesehatan menempati urutan pertama anggaran terbesar yaitu sebesar 62,01 persen dari pagu anggaran pembinaan lingkungan sosial. Di bidang kesehatan ini, penyediaan/peningkatan/pemeliharaan sarana prasarana Fasilitas Kesehatan merupakan pendanaan yang paling dominan yaitu sebesar 72,52 persen dari pagu anggaran bidang kesehatan, sementara anggaran untuk pembayaran iuran Jaminan Kesehatan (bagi penduduk yang didaftarkan oleh pemerintah daerah dan/atau pembayaran iuran jaminan kesehatan bagi pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja) sebesar Rp308,33 miliar atau setara dengan 22,53 persen dari pagu anggaran bidang kesehatan.

### Dana Transfer Khusus (DTK)

DTK mempunyai peran yang sangat strategis karena dalam komponen transfer khusus inilah Pemerintah Pusat akan mempunyai peranan untuk mempengaruhi pola belanja daerah dalam upaya mengurangi kesenjangan layanan antar-daerah. Hal ini dilakukan melalui earmarking (pengarahan/penentuan) penggunaan dari DTK. Dalam APBN 2018, DTK dianggarkan sebesar Rp185,89 triliun, terdiri atas DAK Fisik sebesar Rp62,44 triliun dan DAK Nonfisik sebesar Rp123,45 triliun. Sampai dengan tanggal 30 September 2018, realisasi penyaluran DTK mencapai Rp123,18

triliun, atau 66,27 persen dari pagu dalam APBN TA 2018. Realisasi tersebut lebih tinggi Rp18,49 triliun bila dibandingkan dengan realisasi periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp104,69 triliun, atau 53,38 persen dari pagu APBNP TA 2017.

### Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik

Realisasi penyaluran DAK Fisik per 30 September 2018 mencapai Rp35,65 triliun atau 57,11 persen dari pagu alokasi tahun 2018 yang sebesar Rp62,44 triliun. Realisasi DAK Fisik tersebut lebih tinggi Rp2,53 triliun apabila dibandingkan dengan realisasi pada periode yang sama tahun 2017 (Rp33,13 triliun, atau 47,64 persen dari pagu). Realisasi tersebut terdiri dari : (i) DAK Reguler sebesar Rp18,23 triliun, (ii) DAK Penugasan sebesar Rp13,76 triliun, dan (iii) DAK Afirmasi sebesar Rp3,67 triliun. Kenaikan outlook realisasi penyaluran DAK Fisik tahun 2018 tersebut antara lain disebabkan karena adanya :

1. perbaikan mekanisme penyaluran yang difokuskan untuk menjamin ketercapaian target output yang telah direncanakan secara nasional, antara lain melalui percepatan penyampaian daftar kontrak kegiatan DAK Fisik yang pada tahun sebelumnya disampaikan paling lambat 31 Agustus 2017, diubah menjadi paling lambat 23 Juli 2018 dalam pelaksanaan penyaluran DAK Fisik tahun 2018. Perbaikan batas waktu penyampaian daftar kontrak tersebut telah mendorong percepatan kegiatan DAK Fisik di daerah.

2. percepatan penyaluran tahap 1, antara lain dengan mendorong/ memberitahukan kepada daerah untuk segera memenuhi persyaratan penyaluran melalui surat, SMS Blast, dan sosialisasi bekerja sama dengan kementerian negara/ lembaga teknis (K/L) dan Kementerian Dalam Negeri.

Sampai akhir Juli 2018, dari daftar kontrak yang telah disampaikan oleh Pemda, jumlah kegiatan DAK Fisik yang telah dikontrakkan oleh daerah nilainya mencapai 93,52 persen dari pagu total sebesar Rp62,44 triliun. Berdasarkan data kontrak tersebut, diperkirakan outlook penyaluran DAK Fisik tahun 2018 akan lebih besar dibanding dengan realisasi penyaluran DAK tahun 2017 sebesar 87,6 persen (tidak memperhitungkan DAK carry over 2016). Angka outlook penyaluran DAK Fisik yang lebih besar tersebut menunjukkan adanya perbaikan perencanaan DAK Fisik di daerah pada tahun 2018.

### Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik

Dengan alokasi anggaran DAK Nonfisik sebesar Rp123,45 triliun pada APBN 2018, diharapkan dapat meringankan beban masyarakat dan mempermudah akses masyarakat terhadap layanan publik. Sampai dengan tanggal 30 September 2018, realisasi penyaluran DAK Nonfisik mencapai Rp87,53 triliun, atau 70,90 persen dari pagu alokasi dalam

APBN 2018. Secara nominal, realisasi tersebut lebih tinggi Rp15,96 triliun bila dibandingkan dengan realisasi pada periode yang sama tahun 2017 sebesar Rp71,56 triliun.

Pada tahun 2018 telah dilakukan perbaikan penyaluran DAK Nonfisik, terutama Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan (Admuduk) dan Dana Tunjangan Khusus Guru (TKG), yang sebelumnya disalurkan secara sekaligus, atau sesuai besaran persentase tertentu yang ditetapkan per triwulan, diubah penyalurannya menjadi berdasarkan kinerja pelaksanaan. Dengan demikian penyaluran kedua jenis DAK Nonfisik tersebut hanya dilaksanakan apabila daerah yang telah memenuhi kinerja penyerapan dana dan persyaratan pelaporan.

Untuk meningkatkan realisasi penyaluran DAK Nonfisik, Kementerian Keuangan telah melakukan berbagai upaya, antara lain berkoordinasi dengan K/L pengampu untuk mendorong daerah segera menyampaikan laporan melalui aplikasi pelaporan DAK Nonfisik yang dilakukan melalui kegiatan sosialisasi, rekonsiliasi data, pemberitahuan melalui surat kepada daerah, dan kegiatan lainnya.

### DANA INSENTIF DAERAH (DID)

Pada APBN 2018, anggaran pagu DID ditetapkan sebesar Rp8,50 triliun. Hingga 30 September 2018, realisasi penyaluran DID mencapai Rp7,24

triliun atau 85,16 persen dari pagu alokasi. Realisasi tersebut lebih rendah jika dibandingkan dengan realisasinya dalam periode yang sama tahun lalu sebesar Rp7,50 triliun, atau 100 persen. Lebih rendahnya realisasi penyaluran DID tersebut terutama disebabkan karena adanya perubahan pola penyaluran DID yang mensyaratkan adanya kinerja penyerapan dalam penyaluran tahap II, yang pada tahun sebelumnya tidak dipersyaratkan. Sebagaimana diketahui bahwa penyaluran DID tahun 2018, dilakukan dalam 2 (dua) tahap, yakni tahap I, paling cepat pada bulan Februari sebesar 50 persen, dan tahap II paling cepat bulan Juli sebesar 50 persen setelah Pemda menyampaikan laporan realisasi penyerapan dana tahap I yang menunjukkan penyerapan minimal 70 persen, paling lambat bulan Agustus.

### Dana Otonomi Khusus (OTSUS) dan Dana Keistimewaan D.I. Yogyakarta

Dalam APBN 2018, pagu anggaran Dana Otsus pada Provinsi Aceh, serta Dana Otsus dan Dana Tambahan Infrastruktur pada Provinsi Papua dan Papua Barat ditetapkan sebesar Rp20,06 triliun. Sampai dengan 30 September 2018, realisasi penyaluran Dana Otsus dan Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) mencapai Rp13,24 triliun, atau 66,03 persen dari pagu. Realisasi tersebut lebih rendah Rp1,02 triliun dibandingkan dengan realisasi pada periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp14,26

triliun. Lebih rendahnya realisasi penyaluran Dana Otsus dan DTI disebabkan karena belum dipenuhinya persyaratan penyaluran DTI Tahap II oleh Pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat sesuai dengan PMK No. 50 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa.

Sementara itu, dari pagu Dana Keistimewaan pada Provinsi DI Yogyakarta (DIY) sebesar Rp1,00 triliun, realisasinya sampai dengan 30 September 2018 mencapai Rp0,80 triliun, atau 80,0 persen. Secara nominal realisasi tersebut lebih tinggi Rp160 miliar dibandingkan dengan realisasi pada periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp0,64 triliun.

### Dana Desa

Sampai dengan tanggal 30 September 2018, realisasi penyaluran Dana Desa Tahap I, Tahap II, dan Tahap III dari RKUN ke RKUD telah mencapai Rp37,92 triliun, atau 63,20 persen dari pagu alokasi sebesar Rp60,00 triliun. Realisasi tersebut sedikit lebih rendah dibandingkan dengan realisasinya pada periode yang sama tahun 2017 sebesar Rp39,63 triliun atau 66,06 persen dari pagu alokasi. Lebih rendahnya realisasi penyaluran Dana Desa disebabkan karena belum dipenuhinya persyaratan penyaluran Dana Desa Tahap III oleh Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan PMK No. 225 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas PMK No. 50 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa.

Selanjutnya dalam rangka mempercepat penyaluran Dana Desa Tahap III, Kementerian Keuangan akan meningkatkan koordinasi dengan Kementerian/ Lembaga lain guna mendorong daerah untuk segera menyampaikan laporan realisasi penyaluran Dana Desa dan laporan konsolidasi penggunaan Dana Desa sampai dengan Tahap II sebagai syarat penyaluran Tahap III. Disamping itu, KPPN juga diminta untuk terus berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan penyaluran Dana Desa Tahap III.

REALISASI TKDD  
TAHUN ANGGARAN 2017 dan 2018 (YoY)  
Tanggal : 1 Januari s.d. 30 September 2018

(dalam miliar rupiah)

Uraian	2017			2018		
	Alokasi	Realisasi	%	Alokasi	Realisasi	%
Transfer ke Daerah dan Dana Desa	766.339,33	502.605,46	65,59	766.162,58	573.769,35	74,89
Transfer ke Daerah	706.339,33	466.063,08	65,98	706.162,58	535.847,98	75,88
<b>A. Dana Perimbangan</b>	<b>678.596,04</b>	<b>449.532,40</b>	<b>66,24</b>	<b>676.602,99</b>	514.564,79	76,05
1. Dana Transfer Umum	493.959,54	350.965,08	71,05	490.714,92	391.379,80	79,76
a. Dana Bagi Hasil	95.377,22	51.054,26	53,53	89.225,34	57.214,61	64,12
b. Dana Alokasi Umum	398.582,31	299.910,82	75,24	401.489,58	334.165,19	83,23
2. Dana Transfer Khusus	184.636,50	98.567,32	53,38	185.888,07	123.184,99	66,27
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	69.531,50	27.659,05	39,78	62.436,26	35.654,97	57,11
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	115.105,00	70.908,27	61,60	123.451,81	87.530,02	70,90
<b>B. Dana Insentif Daerah</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>8.500,00</b>	7.238,50	85,16
<b>C. Dana Otsus dan Dana</b>	<b>20.243,29</b>	<b>9.030,67</b>	<b>44,61</b>	<b>21.059,58</b>	14.044,69	66,69
Keistimewaan DIY						
1. Dana Otsus	19.443,29	8.390,67	43,15	20.059,58	13.244,69	66,03
a. Provinsi Papua dan Papua Barat	7.971,65	4.993,90	61,89	8.029,79	6.022,34	75,00
b. Provinsi Aceh	7.971,65	2.406,78	30,19	8.029,79	6.022,34	75,00
c. Dana Tambahan Infrastruktur	3.500,00	1.050,00	30,00	4.000,00	1.200,00	30,00
2. Dana Keistimewaan D.I.Y	800,00	640,00	80,00	1.000,00	800,00	80,00
Dana Desa	60.000,00	36.542,38	60,90	60.000,00	37.921,38	63,20

# PEMBIAYAAN UTANG

Pertumbuhan Pembiayaan Anggaran dalam 2 Tahun Terakhir Menurun (Negatif), Sejalan dengan Penurunan Pertumbuhan SBN sebesar negatif 19,12 persen (yoy)

(dalam miliar Rupiah)

	2018	Realisasi		
	APBN	s.d. 30 Sept 2018	% APBN	% Growth (yoy)
Pembiayaan Utang	399.219,4	304.940,3	76,38	(21,62)
1. Surat Berharga Negara (Neto)	414.520,7	308.758,2	74,49	(19,12)
2. Pinjaman (Neto)	(15.301,3)	(3.817,9)	24,95	(152,22)
a. Pinjaman Dalam Negeri(Neto)	3.137,7	499,9	15,93	73,82
i. Penarikan Pinjaman Dalam Negeri(Bruto)	4.000,0	1.012,9	22,51	64,43
ii. Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman DN	(1.362,1)	(513,0)	37,66	56,21
b. Pinjaman Luar Negeri(Neto)	(18.439,3)	(4.317,8)	23,42	(161,48)
i. Penarikan Pinjaman Luar Negeri(Bruto)	51.345,9	46.146,5	89,87	(5,17)
ii. Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman LN	(69.785,2)	(50.464,3)	72,31	21,19

Hingga akhir September 2018, realisasi pembiayaan utang telah mencapai Rp304,94 triliun dari Rp399,22 triliun yang ditetapkan pada APBN 2018 atau telah mencapai sebesar 76,38 persen APBN. Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2017, realisasi pembiayaan utang

mengalami pertumbuhan negatif 21,62 persen. Surat Berharga Negara (SBN) sebagai salah satu sumber pembiayaan yang ditetapkan sebesar Rp414,52 triliun dalam APBN 2018 telah terealisasi sebesar Rp308,76 triliun atau 74,49 persen dari target APBN. Sedangkan sumber pembiayaan lainnya,

Pinjaman telah terealisasi sebesar Rp3,82 triliun atau mencapai 24,95 persen dari target dalam APBN 2018.

Instrumen pembiayaan Pinjaman tersebut terdiri atas pinjaman dalam negeri dan pinjaman luar negeri. Untuk pinjaman dalam negeri yang ditetapkan sebesar Rp3,14 triliun sampai dengan akhir September 2018 realisasinya telah mencapai Rp499,90 miliar atau 15,93 persen APBN, dengan rincian penarikan pinjaman dalam negeri sebesar Rp1,01 triliun sementara pembayaran cicilan pokok pinjaman dalam negeri sebesar Rp513 miliar.

Pada APBN 2018, pinjaman luar negeri secara neto antara penarikan dan pelunasan ditetapkan sebesar negatif Rp18,44 triliun, dimana pembayaran cicilan pokok pinjaman luar negeri ditetapkan sebesar Rp69,79 triliun dan penarikan pinjaman luar negeri diproyeksikan sebesar Rp51,35 triliun. Dengan demikian, untuk APBN tahun 2018 pembayaran cicilan pinjaman

luar negeri lebih banyak dibandingkan dengan penarikannya.

Hingga akhir September 2018 pinjaman luar negeri telah terealisasi sebesar minus Rp4,32 triliun atau sebesar 23,42 persen dari target APBN. Adapun penarikan pinjaman luar negeri periode ini telah dilakukan sebesar Rp46,15 triliun, sementara pembayaran cicilan pokoknya sebesar Rp50,46 triliun atau masing-masing sebesar 89,87 persen dan 72,31 persen dari target APBN.

Pemerintah berkomitmen menjaga kredibilitas APBN, antara lain dengan mengoptimalkan pembiayaan proyek dalam APBN. Saat ini Pemerintah sedang mensosialisasikan pembiayaan program SDG (Sustainable Development Goals) yang mengajak keterlibatan swasta baik secara individu melalui para donatur philanthropist maupun badan usaha seperti melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), pinjaman lunak, maupun blended finance. Kedepannya diharapkan semakin banyak infrastruktur yang dapat terbangun dan semakin berkurangnya beban APBN untuk pembangunan proyek infrastruktur yang pada akhirnya akan meningkatkan taraf hidup rakyat Indonesia.

Posisi Utang hingga akhir September 2018

	September -17		September -18	
	Nominal	Komposisi	Nominal	Komposisi
Total Utang Pemerintah Pusat	3.866,45	100,00%	4.416,37	100,00%
a. Pinjaman	737,99	19,09%	823,11	18,64%
1. Pinjaman Luar Negeri	732,46	18,94%	816,73	18,49%
Bilateral	311,86	8,07%	328,35	7,43%
Multilateral	375,00	9,70%	440,89	9,98%
Komersial	44,65	1,15%	45,98	1,04%
Suppliers	0,96	0,02%	1,51	0,03%
2. Pinjaman Dalam Negeri	5,53	0,14%	6,38	0,14%
b. Surat Berharga Negara	3.128,46	80,91%	3.593,26	81,36%
1. Denominasi Rupiah	2.279,65	58,96%	2.537,16	57,45%
Surat Utang Negara	1.911,39	49,44%	2.123,35	48,08%
Surat Berharga Syari'ah Negara	368,26	9,52%	413,81	9,37%
2. Denominasi Valas	848,81	21,95%	1.056,10	23,91%
Surat Utang Negara	680,16	17,59%	824,70	18,67%
Surat Berharga Syari'ah Negara	168,65	4,36%	231,40	5,24%
Pendapatan Domestik Bruto**			14.495,85	
Rasio Utang thd PDB			30,47%	

\*\* Asumsi PDB hingga Akhir September 2018

Ekonomi Indonesia yang tumbuh dan didorong oleh tengah dijalankannya paket-paket kebijakan perekonomian serta reformasi struktural yang berkelanjutan telah menempatkan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia pada akhir September 2018 diperkirakan mencapai Rp14.495,85 triliun. Dengan jumlah PDB tersebut, rasio utang Pemerintah per akhir Agustus menjadi 30,47 persen.

Rasio tersebut masih jauh di bawah batas 60 persen terhadap PDB sebagaimana ketentuan Undang-undang Keuangan Negara Nomor 17 Tahun 2003. Capaian ini menunjukkan bahwa Pemerintah telah melakukan pengelolaan utang dengan serius secara pruden dan akuntabel. Jumlah utang Pemerintah tersebut masih terjaga pada level yang aman.

Dari segi komposisi utang, pinjaman luar negeri yang berasal dari kreditur Multilateral mengalami peningkatan 17,57 persen yoy, dari Rp375,00 triliun di akhir September 2017 menjadi Rp440,89 triliun pada akhir bulan September 2018. Secara nominal maupun persentase, pinjaman luar negeri Multilateral mengalami peningkatan yang tinggi dibandingkan jenis pinjaman luar negeri lainnya. Hal ini menunjukkan pengelolaan utang yang semakin pruden dari Pemerintah untuk mencapai pemanfaatan utang yang efisien. Pemerintah mengutamakan pinjaman Multilateral yang biayanya relatif lebih murah dibandingkan dengan jenis pinjaman lainnya. Selain itu, pinjaman Multilateral juga membawa lebih banyak benefit bagi negara seperti adanya alih teknologi serta *sharing knowledge* dan *expertise* yang diberikan oleh lembaga-lembaga kreditur Multilateral. Keuntungan yang diperoleh ini masih dibutuhkan oleh Indonesia dalam menangani isu-isu pembangunan di bidang struktural dan sektoral, sejalan dengan agenda lembaga Multilateral tersebut dalam menjalankan program pembangunan global. Program pembangunan global tersebut secara langsung terkait juga dengan program-program pembangunan di Indonesia yang produktif, antara lain program pembangunan di bidang infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial.

Selain berasal dari Pinjaman, pembiayaan kegiatan produktif Pemerintah juga bersumber dari SBN yang saat ini semakin diminati oleh investor karena kondisi fundamental ekonomi Indonesia yang kuat. Peran SBN sebagai sumber pembiayaan semakin dominan karena demand SBN di pasar keuangan yang cukup besar, dimana hingga akhir September 2018 SBN telah berjumlah Rp3.593,26 triliun.

Pemerintah terus menerus melakukan inovasi di bidang pembiayaan melalui SBN, diantaranya dengan pembiayaan kreatif, sehingga ketergantungan akan pinjaman luar negeri semakin berkurang. Untuk itu, Pemerintah melakukan pendalaman pasar domestik seperti penerbitan Savings Bond Ritel (SBR) seri SBR003 dan SBR004 yang diterbitkan dengan sistem online maupun Obligasi Negara Ritel seri ORI015 yang diterbitkan dengan melibatkan agen penjual. Pemerintah mengelola pembiayaan secara hati-hati dan terukur, dimana penerbitan SBN maupun pengadaan Pinjaman dilakukan berdasarkan strategi pembiayaan yang ditetapkan dalam jangka tahunan dan menengah serta manajemen risiko.

## Dana Cadangan Penanggulangan Bencana Alam

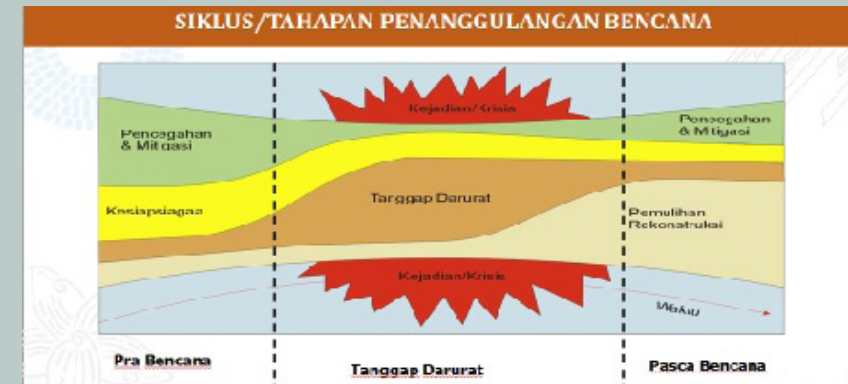
**B**encana alam gempa bumi berkekuatan 7 Mw yang melanda Lombok, NTB pada 5 Agustus 2018 telah mengakibatkan korban jiwa dan kerusakan yang luar biasa di berbagai aspek kehidupan masyarakat dan pemerintahan. Korban jiwa akibat bencana ini mencapai 555 jiwa meninggal dan 390.529 penduduk mengungsi. Wilayah yang terkena dampak bencana alam gempa bumi sangat mendesak untuk segera ditangani, guna mengembalikan kondisi psikologis penduduk, kehidupan sosial ekonomi dan pemerintahan melalui usaha-usaha rehabilitasi dan rekonstruksi.

Untuk menangani dampak bencana alam, Pemerintah telah mengalokasikan dana cadangan bencana alam, yang diperuntukan untuk tanggap darurat, serta kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Pada tahun 2018 telah dialokasikan dana cadangan bencana alam sebesar Rp4.000,0 miliar. Realisasi dana cadangan melalui SABA dan Hibah sebesar Rp2.112,1 miliar, yang digunakan untuk tanggap darurat, stimulan perbaikan rumah,

serta hibah kepada pemda untuk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi. Sisa alokasi dana cadangan sebesar Rp1.887,9 miliar, yang sampai akhir tahun 2018 berpotensi memerlukan tambahan dana cadangan untuk penanganan bencana alam di Lombok dan Sulawesi Tengah (Palu dan Donggala).

Pada proses penanggulangan bencana gempa di Lombok NTB, Pemerintah telah memberi bantuan melalui BNPB dengan melakukan operasi dan logistik bencana, serta bantuan stimulan rumah, dengan anggaran sebesar **1.075,1 miliar**. Dari anggaran tersebut sebagian besar digunakan untuk bantuan stimulan rumah sebesar **Rp976,62 miliar** bagi 42.217 unit rumah, dengan rincian sebagai berikut:

- (i) 23.347 rumah rusak berat dengan bantuan masing-masing Rp50 juta/rumah (total Rp720,75 miliar) (tahap awal sebagian baru menerima bantuan sebesar masing-masing Rp25 juta/rumah
- (ii) 4.478 rumah rusak sedang dengan bantuan masing-masing



- Rp25 juta/rumah (total Rp111,95 miliar)
- (iii) 14.392 rumah rusak ringan dengan bantuan masing-masing Rp10 juta/rumah (total Rp143,92 miliar)

Selain itu, terdapat beberapa kementerian/lembaga telah merealisasikan anggaran untuk penanganan bencana di Lombok, antara lain:

- I. Kementerian Sosial telah merealisasikan bantuan logistik, santunan ahli waris, paket sembako, serta dapur umum, dengan anggaran sebesar 235,0 miliar.
- II. Kementerian Kesehatan telah merealisasikan logistik kesehatan lingkungan, obat-obatan, logistik gizi, *orthopedic set*, tenda pos kesehatan, logistik persalinan dan peralatan kesehatan lainnya,

dengan anggaran sebesar Rp11,4 miliar.

- III. Kementerian PURR telah memobilisasi bantuan berupa tangki air, mobil sanitasi, *dumpruck*, toilet cabin, genset, dan tenda hunian darurat, dengan anggarannya sebesar Rp176,2 miliar.
- IV. Kemendikbud telah memberi bantuan guru, pembelajaran, peralatan *mobile* dan *school kit*, dengan anggaran sebesar Rp285,8.
- V. Kementerian ESDM melalui kegiatan pembuatan sumur tanggap darurat di lokasi pengungsian, dengan anggaran Rp2,1 miliar.

Dengan demikian bantuan yang telah disalurkan untuk menangani bencana di Lombok NTB, melalui anggaran kementerian/lembaga sebesar **Rp1.786,6 miliar**.



## Realisasi APBN s.d. September 2017 dan 2018

(dalam miliar rupiah)

URAIAN	2017			2018		
	APBNP	Realisasi s.d. 30 Sep	% thd APBNP	APBN	Realisasi s.d. 30 Sep	% thd APBN
<b>A. PENDAPATAN NEGARA</b>	1.736.060,1	1.102.966,4	63,53%	1.894.720,4	1.312.319,8	69,3%
I. PENDAPATAN DALAM NEGERI	1.732.952,0	1.100.347,5	63,50%	1.893.523,5	1.305.874,0	69,0%
1. PENERIMAAN PERPAJAKAN	1.472.709,9	879.030,1	59,69%	1.618.095,5	1.024.505,7	63,3%
a. Pajak Dalam Negeri	1.436.730,9	851.762,3	59,28%	1.579.395,5	990.870,8	62,7%
b. Pajak Perdagangan Internasional	35.979,0	27.267,8	75,79%	38.700,0	33.634,9	86,9%
2. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	260.242,1	221.317,4	85,04%	275.428,0	281.368,3	102,2%
II. HIBAH	3.108,1	2.618,9	84,26%	1.196,9	6.445,8	538,5%
<b>B. BELANJA NEGARA</b>	2.133.295,9	1.375.001,0	64,45%	2.220.657,0	1.512.553,6	68,1%
I. BELANJA PEMERINTAH PUSAT	1.366.956,6	808.433,3	59,14%	1.454.494,4	938.784,2	64,5%
1. Belanja K/L	798.585,3	450.157,8	56,37%	847.435,2	511.462,9	60,4%
2. Belanja Non /L	568.371,3	358.275,5	63,04%	607.059,2	427.321,3	70,4%
II. TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA	766.339,3	566.567,7	73,93%	766.162,6	573.769,4	74,9%
1. Transfer ke Daerah	706.339,3	526.934,0	74,60%	706.162,6	535.848,0	75,9%
2. Dana Desa	60.000,0	39.633,7	66,06%	60.000,0	37.921,4	63,2%
<b>C. KESEIMBANGAN PRIMER</b>	(178.039,4)	(99.240,2)	55,74%	(87.329,5)	(2.395,9)	2,7%
<b>D. SURPLUS/(DEFISIT) ANGGARAN (A-B)</b>	(397.235,8)	(272.034,6)		(325.936,6)	(200.233,8)	
% Surplus / (Defisit) Anggaran thd PDB	(2,92)	(2,02)		(2,19)	(1,35)	
<b>E. PEMBIAYAAN ANGGARAN (I+II+III+IV+V)</b>	397.235,8	391.155,4	98,47%	325.936,6	292.832,7	89,8%
I. PEMBIAYAAN UTANG	461.343,6	389.038,1	84,33%	399.219,4	304.940,3	76,4%
II. PEMBIAYAAN INVESTASI	(59.733,8)	(350,0)	0,59%	(65.654,3)	(13.861,1)	21,1%
III. PEMBERIAN PINJAMAN	(3.668,7)	2.291,3	-62,46%	(6.690,1)	1.639,5	-24,51%
IV. KEWAJIBAN PENJAMINAN	(1.005,4)	-	0,00%	(1.121,3)	-	0,0%
V. PEMBIAYAAN LAINNYA	300,0	176,0	58,67%	183,0	114,0	62,3%
<b>KELEBIHAN (KEKURANGAN) PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	-	<b>119.120,8</b>	-	-	<b>92.598,9</b>	

Halaman Kosong



**KEMENTERIAN KEUANGAN**  
REPUBLIK INDONESIA

[www.kemenkeu.go.id/apbnkita](http://www.kemenkeu.go.id/apbnkita)